

SKRIPSI

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL,
PENGELUARAN PEMERINTAH DAN JUMLAH
PENDUDUK TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH DI PROVINSI ACEH**



Disusun oleh :

**SYAHRIAL SAGIR
NIM. 160604023**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M / 1445 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Syahrial Sagir
NIM : 160604023
Program Studi : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Juni 2023

Yang Menyatakan



Syahrial Sagir

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Regional, Pengeluaran Pemerintah dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Aceh

Disusun Oleh:

Syahrial Sagir
NIM: 160604023

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si
NIP. 197204281999031005

Uliya Azra, SE., M.Si
NIP. 199410022022032001

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi,

Cut Dian Fitri, M.Si, Ak, CA
NIP. 198307092014032002

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Regional, Pengeluaran
Pemerintah dan Jumlah Penduduk Terhadap
Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Aceh**

Syahrial Sagir
NIM: 160604023

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) Bidang Ilmu Ekonomi

Pada Hari/Tanggal: 25 Juli 2023 M
Selasa, 07 Muharram 1445 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si
NIP. 197204281999031005

Uliya Azra, SE., M.Si
NIP. 199410022022032001

Penguji I,

Penguji II,

Jariah Abu Bakar, S.E., M.Si
NIP. 197508282005012001

Rachmi Meutia, M.Sc.
NIP. 198803192019032013

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Hafas Furqani, M. Ed.
NIP. 198006252009011009



**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Syahrial Sagir
NIM : 160604023
Fakultas/Program Studi : Ilmu Ekonomi
E-mail : 160604023@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi Lainnya

yang berjudul :

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Regional, Pengeluaran Pemerintah Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Aceh

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasi-kannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 15 Agustus 2023

Mengetahui

Penulis,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Syahrial Sagir
NIM: 160604023

Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si
NIP. 197204281999031005

Uliya Azra, SE., M.Si
NIP. 199410022022032001

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **"Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Regional, Pengeluaran Pemerintah dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Aceh.** Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Cut Dian Fitri, M.Si. Ak. CA., sebagai Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Hafiizh Maulana, SP., S.HI., ME selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si selaku Pembimbing I yang telah membantu, mengarahkan dengan baik dalam proses penyelesaian skripsi dari awal hingga akhir.

5. Uliya Azra, SE., M.Si selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan yang dapat memudahkan penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta Ayahanda Abdul Munir dan Ibunda Nyak Helmiah, yang selalu memberikan kasih sayang, do'a serta dorongan moril maupun materil yang tak terhingga agar penulis memperoleh yang terbaik dan mampu menyelesaikan studi hingga tahap akhir. Serta segenap keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan selama ini.
8. Teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Ekonomi angkatan 2016 yang turut membantu serta memberi saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan untuk teman yang sangat istimewa, yang tidak penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu. Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 15 Juni 2023

Penulis,

Syahrial Sagir

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ع	‘
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*
رَمَى : *ramā*
قِيلَ : *qīla*
يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta *marbutah* (ة) hidup
Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- Ta *marbutah* (ة) mati
Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَانِ : *Rauḍah al-atfāl/ raudatulatfāl*

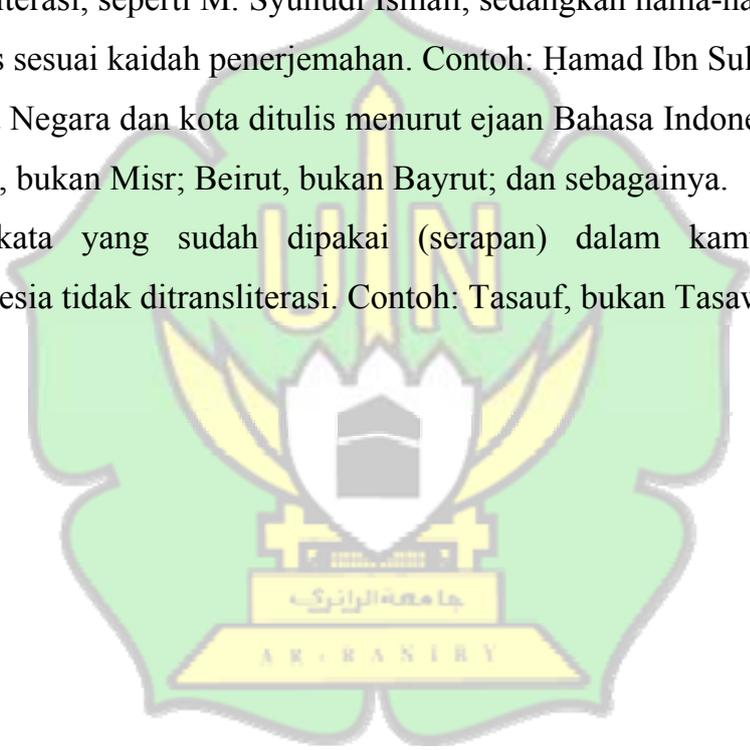
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/ alMadīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talhah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : Syahrial Sagir
NIM : 160604023
Fakultas/Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmu Ekonomi
Judul : Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Regional, Pengeluaran Pemerintah dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Aceh
Pembimbing I : Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si
Pembimbing II : Uliya Azra, SE., M.Si

Salah satu tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemandirian, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui PAD. Hal ini dikarenakan PAD merupakan aspek penting di dalam APBD, Jika sumbangan PAD terhadap APBD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi. Dalam penelitian ini, beberapa faktor yang dianggap dapat menghambat atau meningkatkan PAD secara umum adalah faktor pertumbuhan ekonomi regional, pengeluaran pemerintah dan jumlah penduduk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi regional, pengeluaran pemerintah dan jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Jenis data yang penulis gunakan pada penelitian dan penulisan skripsi ini adalah data sekunder, yaitu berupa data time series berupa laporan realisasi anggaran (LRA) pada APBD provinsi aceh, data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan data jumlah penduduk Provinsi Aceh yang bersumber dari BPS Provinsi Aceh tahun 1990-2022. Pengolahan data dilakukan menggunakan persamaan regresi linier berganda dengan uji stasioneritas data dan uji derajat kointegrasi dengan menggunakan program Eviews12. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi regional tidak berpengaruh terhadap PAD Provinsi Aceh, baik itu dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Pengeluaran pemerintah berpengaruh dalam jangka panjang terhadap PAD Provinsi Aceh. Namun pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh dalam jangka pendek terhadap PAD Provinsi Aceh. Jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap PAD Provinsi Aceh, baik itu dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek.

Kata Kunci : pertumbuhan ekonomi regional, pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk.

DAFTAR ISI

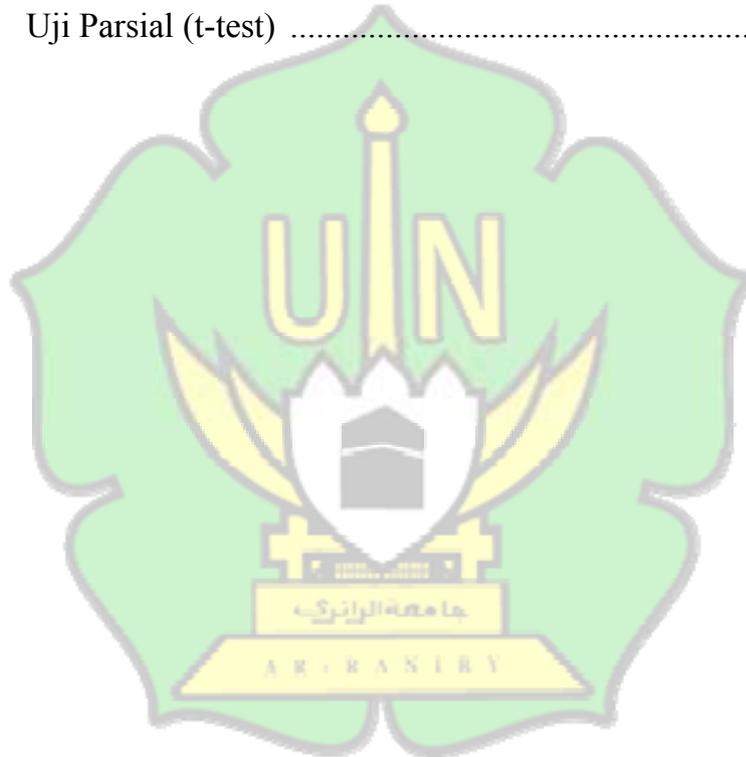
	Halaman
HALAMAN SAMPUL JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian	12
1.5. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN TEORITIS	14
2.1. Otonomi Daerah	14
2.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	15
2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	15
2.2.2 Jenis dan Komponen Pendapatan Asli Daerah	16
2.2.3 Indikator Pendapatan Asli Daerah	18
2.2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah	22
2.3. Pertumbuhan Ekonomi Regional	23
2.3.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi Regional	23
2.3.2 Indikator Pertumbuhan Ekonomi Regional	25
2.4. Pengeluaran Pemerintah	27
2.4.1 Pengertian Pengeluaran Pemerintah	27
2.4.2 Jenis Pengeluaran Daerah	29
2.5. Jumlah Penduduk	30
2.5.1 Pengertian Penduduk	30
2.5.2 Kriteria Penduduk	31
2.5.3 Indikator Jumlah Penduduk	32
2.6. Penelitian Sebelumnya	33
2.7. Keterkaitan Variabel	36

2.8. Kerangka Pemikiran	41
2.9. Hipotesis Penelitian	42
BAB III METODE PENELITIAN	43
3.1. Rancangan Penelitian	43
3.2. Jenis dan Sumber Data	43
3.3. Populasi dan Sampel Penelitian	44
3.4. Variabel Penelitian	45
3.5. Definisi Operasional Variabel	46
3.6. Teknik Analisis Data	46
3.7. Pengujian Hipotesis	47
BAB IV PEMBAHASAN	50
4.1. Gambaran Umum Provinsi Aceh	50
4.2. Hasil Penelitian	51
4.2.1 Statistik Deskriptif	52
4.2.2 Hasil Pengujian Hipotesis	54
4.2. Pembahasan	58
BAB V PENUTUP	63
5.1. Kesimpulan	63
5.2. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	68



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data PAD, PDRB, Pengeluaran Pemerintah dan Jumlah Penduduk Provinsi Aceh 10 Tahun Terakhir	7
Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya	35
Tabel 3.1 Definisi dan Operasional Variabel Penelitian	46
Tabel 4.1 Deskripsi Variabel Penelitian	52
Tabel 4.2 Hasil Regresi Linier Berganda	54
Tabel 4.3 Tabel Model Summary	56
Tabel 4.4 Analisis of Variance (Anova)	56
Tabel 4.6 Uji Parsial (t-test)	57



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran	41



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. SK Pembimbing
- Lampiran 2. Surat Izin Penelitian
- Lampiran 3. Data Asli Variabel
- Lampiran 4. SPSS Out Put
- Lampiran 5. Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah merupakan salah satu sistem yang ada dalam pemerintahan yang senantiasa memberikan kewenangan luas pada suatu daerah atau wilayah tertentu untuk dapat mengatur dalam pengelolaan urusan pemerintahan sendiri sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan setempat. Prinsip otonomi daerah bertujuan memberikan kebebasan dan kemandirian daerah dalam memutuskan masalah-masalah yang berkaitan dengan pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Tujuan dari otonomi daerah yang tertuang dalam UU No. 22 tahun 1999 dengan revisi UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 12 tahun 2008 menyatakan bahwa tujuan daripada otonomi daerah adalah meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa (Sabaruddin, 2016).

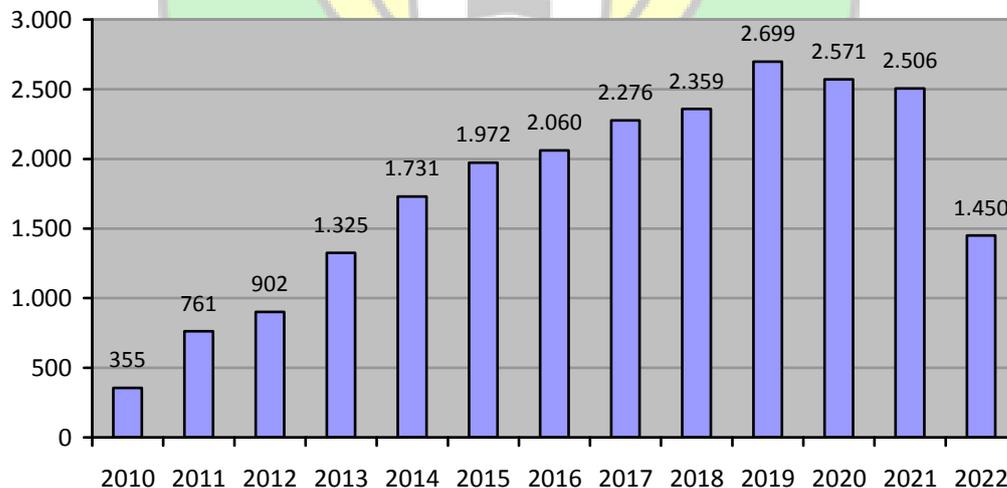
Keberhasilan daerah otonom dilihat dari kemampuannya terhadap pengelolaan keuangan, hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek yang menunjukkan efisiensi, transparansi, dan keberlanjutan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Selain itu ada beberapa indikator penting yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan pengelolaan keuangan suatu daerah otonom, diantaranya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu tingkat keberhasilan dapat diukur dari kemampuan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, seperti pajak daerah, retribusi, dan hasil usaha milik daerah (Abdullah, 2016).

Pendapatan Asli Daerah atau biasa disebut dengan PAD adalah salah satu sumber keuangan milik daerah. PAD dapat mengacu pada sumber pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber yang

ada di dalam wilayahnya sendiri, yang nantinya digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pelayanan publik, serta proyek-proyek pembangunan di wilayah tersebut.

Pendapatan Asli Daerah berasal dari beberapa sumber penerimaan, biasanya sumber terbesar berasal dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan keuntungan perusahaan daerah, termasuk pajak daerah dan pendapatan lain selain retribusi daerah. Karena penerimaan ini, daerah memiliki kekuasaan penuh untuk menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan daerah. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tahun 2023 Provinsi Aceh, dapat dilihat bahwa PAD Provinsi Aceh mengalami peningkatan disetiap tahunnya, meskipun tidak terlalu signifikan, sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.1 Perkembangan Jumlah Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh Tahun 2010-2022 (triliun rupiah)



Dari Gambar 4.4 sebelumnya, grafik tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh dari tahun ke tahun tidak begitu signifikan namun secara pasti selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, dari awal tahun 2010 jumlah PAD Aceh sebesar 355

milyar rupiah terus meningkat hingga mencapai 2,69 triliun rupiah di tahun 2019. Namun dari tahun 2020 PAD Aceh terus mengalami penurunan hingga mencapai 1,45 triliun rupiah di tahun 2022.

Peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau biasa disebut dengan APBD akan serta merta ikut mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah, dengan kata lain peningkatan APBD memiliki potensi untuk mendorong beberapa dampak positif dan perkembangan di daerah otonom. APBD yang lebih besar dapat mendorong investasi di daerah karena tersedianya dana publik untuk mendukung inisiatif swasta. Investasi yang meningkat akan membantu menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Selain itu, menurut Saragih (2013:85), salah satu tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemandirian, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui PAD. Hal ini dikarenakan PAD merupakan aspek penting di dalam APBD, Jika sumbangan PAD terhadap APBD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi.

Beberapa faktor yang menghambat atau dapat meningkatkan PAD secara umum akan dipengaruhi oleh beberapa jumlah dan jenis pajak serta retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah. Apabila jumlah jenis pajak dan retribusi daerah yang dipungut tersebut semakin banyak, akan berdampak terhadap peningkatan PAD daerah tersebut. Namun, selain dari pajak dan retribusi, peningkatan PAD dapat pula diperoleh dari pos lain seperti laba perusahaan milik daerah (BUMD), penerimaan dinas pendapatan daerah dan penerimaan dari pemerintah, dan hal ini menjadi indikator utama terhadap naik pendapatan asli daerah (Munawar, 2014).

Selanjutnya menurut Hartoyo (2017), saat ini rata-rata PAD berdasarkan provinsi di Indonesia hanya mampu mencapai 37,8% dari total pendapatan daerah masing-masing. Rendahnya pendapatan asli daerah ini

disebabkan oleh enam faktor. Pertama, keterbatasan sumber daya, yaitu daerah yang memiliki sumber daya alam yang terbatas atau tidak memiliki potensi ekonomi. Kedua ketergantungan pada transfer pemerintah pusat, yaitu jika daerah sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat sebagai sumber utama PAD. Ketiga kurangnya potensi pajak dan retribusi, yaitu daerah mungkin memiliki basis pajak dan retribusi yang terbatas, atau implementasi dan pengumpulan pajak yang tidak efektif. Keempat masalah ekonomi dan pembangunan, yaitu jika daerah mengalami masalah ekonomi, seperti rendahnya tingkat investasi dan pertumbuhan ekonomi yang lambat. Kelima korupsi dan penyimpangan keuangan, yaitu praktik korupsi atau penyimpangan keuangan dalam pengelolaan PAD dapat menyebabkan pendapatan daerah berkurang akibat aliran dana yang tidak benar dan penyalahgunaan sumber daya publik, dan keenam keterbatasan pengelolaan keuangan, yaitu kurangnya kapasitas dan kemampuan dalam mengelola keuangan daerah dapat menyebabkan rendahnya PAD karena kurangnya efisiensi dalam mengumpulkan dan mengelola pendapatan.

Selain itu ada faktor-faktor lain juga menjadi indikator terhadap naik dan turunnya PAD, diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dalam hal ini diukur dengan indikator PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto yang menjadi jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah. PDRB merupakan indikator pertumbuhan ekonomi, yang secara langsung juga berpengaruh terhadap PAD (Alhusain, 2017).

Nilai PDRB atau pendapatan perkapita dapat diperoleh melalui beberapa pendapatan nasional bruto atau pendapatan domestik bruto pada satu waktu tahun tertentu dengan jumlah produk pada tahun tersebut. Menurut Adisasmita (2014), hal ini menunjukkan kemampuan masyarakat untuk membayar pengeluarannya termasuk mengkonsumsi barang dan jasa,

semakin besar tingkat pendapatan perkapita masyarakat mempunyai pengaruh positif dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Sehingga, dalam hal ini dapat kita asumsikan bahwa jika pendapatan seseorang maka semakin tinggi, maka serta merta daya beli juga semakin tinggi sehingga permintaan barang dan jasa juga semakin tinggi, hal ini akan memberikan dampak terhadap kemampuan masyarakat dalam membayar kewajibannya seperti pajak dan retribusi yang ditarik pemerintah daerah. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pendapatan perkapita suatu daerah, semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut.

Faktor lain yang dapat menjadi penghambat atau menjadi pendorong peningkatan PAD berikutnya adalah faktor pengeluaran pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi regional dalam hal ini adalah dalam bentuk belanja daerah yang dapat diartikan sebagai bentuk pengeluaran atau penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program, proyek, dan kegiatan pelayanan publik serta pembangunan di wilayah tersebut. Belanja daerah merupakan salah satu komponen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mencakup semua pengeluaran yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam satu periode anggaran, biasanya dalam satu tahun fiskal.

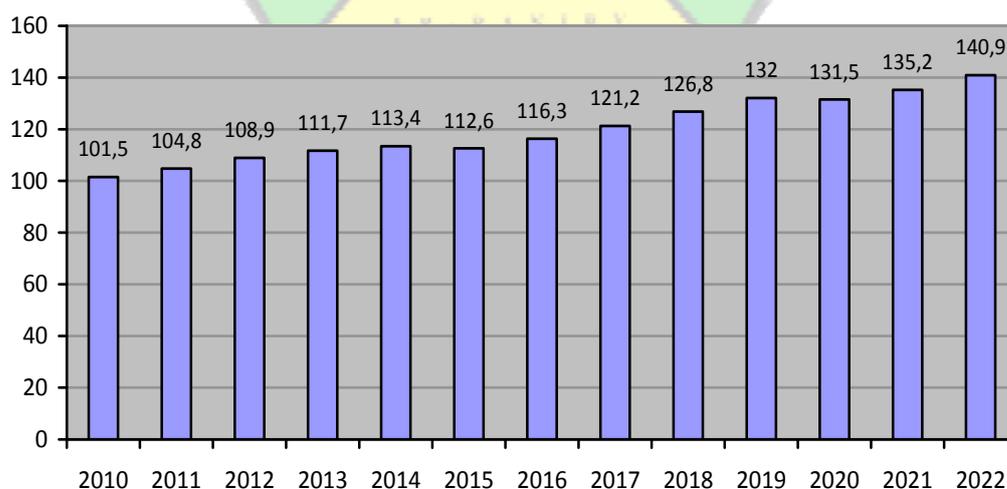
Kaitan pengeluaran pemerintah daerah dengan PAD adalah sebagaimana dikemukakan Mardiasmo (2012) jika semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD, tingginya aktivitas investasi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi, dan pada gilirannya memberikan pemasukan yang signifikan bagi pemerintah daerah setempat.

Faktor penghambat atau dapat meningkatkan PAD yang terakhir adalah faktor sumber daya manusia. Sumber daya manusia dalam hal ini

adalah pertumbuhan penduduk di suatu daerah. Pertumbuhan penduduk mengacu pada perubahan jumlah penduduk suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan penduduk dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk pada dua periode waktu yang berbeda, biasanya dalam setahun. Pertumbuhan penduduk dapat diukur dalam bentuk persentase atau angka mutlak. Dalam hal ini, angka pertumbuhan penduduk yang tinggi tanpa disertai dengan kualitas dari sumber daya manusia dan juga kurangnya penyerapan tenaga kerja, menjadi akar permasalahan dari kemiskinan dan penyebab terhambatnya pertumbuhan ekonomi di suatu daerah yang secara langsung pemasukan daerah melalui PAD juga menjadi rendah.

Menurut Arsyad (2019) pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan memicu pertumbuhan output, sehingga dibutuhkanlah tenaga kerja yang tinggi pula, dari situ dibutuhkan tenaga kerja yang banyak untuk memenuhi permintaan output yang meningkat. Pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk saling berkaitan dan pengaruh mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Lebih jelasnya pertumbuhan ekonomi dalam bentuk PDRB dan jumlah penduduk Provinsi Aceh, dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut ini.

Gambar 1.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Aceh Tahun 2010-2022 (milyar rupiah)



Dari gambar grafik di atas, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi regional Aceh dari tahun ke tahun tidak begitu signifikan namun secara pasti selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, dari awal tahun 2010 pertumbuhan ekonomi regional Aceh sebesar 101,5 milyar rupiah menjadi sebesar 140,9 milyar rupiah di akhir tahun 2022, atau terjadi peningkatan sebesar 39 milyar rupiah selama kurun waktu 12 tahun.

Pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah daerah dan jumlah penduduk saling berkaitan dalam pengaruh mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya, khususnya dalam hal ini adalah dalam meningkatkan PAD. Lebih jelasnya sebagai contoh, pertumbuhan ekonomi dalam bentuk PDRB, pengeluaran pemerintah daerah dan jumlah penduduk Provinsi Aceh, dalam mempengaruhi belanja PAD dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1
Data PAD, PDRB, Pengeluaran Pemerintah dan Jumlah Penduduk
Provinsi Aceh 10 Tahun Terakhir

Tahun	PAD	PDRB	PP	JP
2013	1.325.435.091.289	111.755.826.000	11.220.427.555.134	4.811.133
2014	1.731.130.839.637	113.490.359.000	12.045.847.341.693	4.906.835
2015	1.972.049.032.902	112.665.532.000	12.135.635.484.501	5.201.953
2016	2.060.180.945.551	116.374.299.000	17.314.425.808.142	5.296.248
2017	2.276.305.568.814	121.240.978.000	13.832.848.610.133	5.289.466
2018	2.359.385.393.646	126.824.365.000	12.306.306.187.481	5.281.314
2019	2.698.912.471.144	132.069.570.000	15.787.883.385.490	5.371.532
2020	2.570.775.877.183	131.580.967.000	13.242.212.801.895	5.274.871
2021	2.505.887.909.031	135.251.193.000	13.683.582.127.432	5.233.733
2022	1.450.363.540.947	140.947.643.000	14.776.246.916.127	5.807.855

Sumber: BPS Aceh, 2023.

Pada data di Tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa selama kurun waktu 10 tahun terakhir, PDRB, pengeluaran pemerintah dan jumlah penduduk di provinsi Aceh selalu mengalami peningkatan, dan peningkatan tersebut juga diringi dengan peningkatan PAD pula. Kecuali di tahun 2022, PAD Provinsi Aceh mengalami penurunan hingga mencapai 1,45 triliun rupiah.

Namun ada beberapa fenomena yang menarik jika dilihat pada satu variabel, sebagai contoh yaitu pada variabel pengeluaran pemerintah di tahun 2015, terlihat bahwa Pemerintah Aceh mengalokasikan pengeluarannya sebesar 12,1 triliun rupiah dan PAD di tahun tersebut sebesar 1,9 triliun rupiah. Sedangkan ditahun 2016 alokasi pengeluaran pemerintah mencapai 17,3 triliun atau meningkat sebesar 29,9%. Namun di tahun 2016 PAD Provinsi Aceh hanya meningkat sebesar 4,3% atau sebesar 2,06 triliun rupiah.

Dalam hal ini, sudah semestinya Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja daerah dengan baik, hal ini karena anggaran belanja daerah adalah pertumbuhan ekonomi regional dalam bentuk belanja modal dan belanja langsung yang merupakan merupakan dua kategori utama dalam pengelompokan belanja pemerintah, termasuk belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengeluaran pemerintah daerah yang tepat akan berdampak pada manfaat jangka panjang khususnya dalam dalam membiayai proyek pembangunan, investasi dalam infrastruktur, pembelian barang, dan layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, keamanan, dan lain-lain.

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan penuh untuk menggunakan APBD. APBD adalah anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan serta belanja di tingkat daerah. Pemerintah daerah, seperti kabupaten/kota, memiliki wewenang dalam menentukan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang dihasilkan dari wilayahnya sendiri, mengalokasikan dana dari transfer pemerintah pusat, dan mengelola sumber pendapatan lainnya. APBD digunakan untuk membiayai berbagai program, proyek pembangunan, pelayanan publik, serta infrastruktur dan kebutuhan lainnya di wilayah tersebut. Pengelolaan APBD oleh pemerintah daerah melibatkan proses

perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas lokal. Dalam kerangka APBD, pemerintah daerah harus memastikan bahwa pengeluaran sesuai dengan rencana pembangunan dan kebijakan pemerintah, serta harus memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan dana publik (Mardiasmo, 2012).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Dana untuk pembiayaan pembangunan daerah diupayakan semaksimal mungkin bersumber dari kemampuan keuangan daerah sendiri untuk memacu peningkatan kemandirian daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk itu sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD mutlak untuk diperhatikan. PAD merupakan hal penting dalam mengukur kemandirian keuangan daerah. Semakin besar peranan PAD dalam APBD, maka dapat disimpulkan bahwa peranan pemerintah pusat, dalam hal ini transfer dana ke daerah semakin kecil (Lisa, 2020).

Pengeluaran pemerintah daerah Provinsi Aceh tergolong besar, setiap tahunnya pengeluaran pemerintah daerah dalam bentuk belanja daerah Provinsi Aceh selalu lebih besar hampir lima kali lipat dari PAD Provinsi Aceh. Namun ini bukanlah hal yang asing, karena sudah seharusnya belanja daerah lebih besar guna mendukung program-program yang sudah direncanakan agar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga secara

langsung mengindikasikan bahwa besarnya belanja daerah tidak bisa ditutupi oleh PAD maupun pendapatan-pendapatan lain yang sah. Hal ini membuat Provinsi Aceh masih mengharapkan transferan dana-dana lain seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dari pemerintah pusat. Sehingga terkesan bahwa, jika tanpa adanya transfer dana-dana lain dari pemerintah pusat, maka dapat dipastikan belanja daerah provinsi Aceh akan sangat kecil yang secara langsung akan mengakibatkan pada tertundanya program-program yang sudah direncanakan sebelumnya.

Sebelumnya, Sucita (2013), melakukan penelitian di seluruh kabupaten/ kota se-provinsi Banten, menemukan adanya hubungan antara jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi dengan pendapatan asli daerah Provinsi Banten. Begitu juga halnya dengan Riska (2014), yang melakukan penelitian provinsi Riau, juga menemukan hasil bahwa jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Dengan demikian, melihat fakta dan fenomena yang telah diuraikan di atas, maka akan semakin menarik untuk dikaji lebih jauh, mengingat pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah daerah dan jumlah penduduk yang setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, maka sudah seharusnya seharusnya mampu menghasilkan PAD yang tinggi pula. Hal ini karena unsur-unsur tersebut saling memiliki keterkaitan satu sama lainnya, meskipun secara tidak langsung ada variabel lain yang diduga juga memberi pengaruh terhadap peningkatan-peningkatan PAD. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti juga tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Regional, Pengeluaran Pemerintah dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Aceh"**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi regional terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Aceh.
2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Aceh.
3. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Aceh.
4. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi regiona, pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah Aceh.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi regional terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Aceh.
2. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Aceh.
3. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Aceh.
4. Untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan ekonomi regiona, pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah Aceh

1.4. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi regional, pengeluaran pemerintah dan jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah.
2. Penelitian ini diharapkan menambah kepustakaan dalam dunia pendidikan khususnya untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau sumber informasi atau dokumen yang digunakan sebagai dasar atau pedoman untuk menyusun suatu tulisan, laporan, penelitian, atau keputusan yang berhubungan dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah.
4. Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan manfaat berupa masukan bagi pemerintah daerah untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat keputusan khususnya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

1.5. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk mengatur dan menyusun tulisan agar lebih terstruktur, mudah dipahami, dan dapat mengkomunikasikan ide dengan jelas. Dengan menggunakan sistem dan aturan tertentu dalam penulisan, informasi dapat disampaikan dengan lebih efektif dan efisien. Maka penulisan penelitian ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

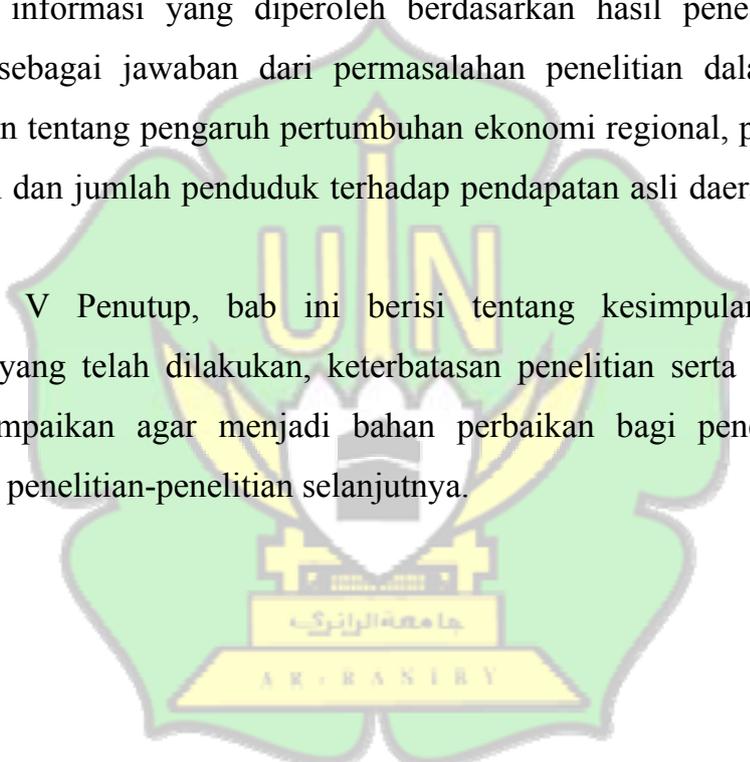
BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori. Dalam bab ini diuraikan konsep-konsep teori tentang pendapatan bagi hasil, pendapatan jual beli, dan laba bersih, serta konsep-konsep lainnya yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian. Dalam bab ini diuraikan metodologi penelitian yang mencakup pendekatan dan jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, metode analisis data, dan hipotesis penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisikan tentang fakta dari informasi yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian yang bertujuan sebagai jawaban dari permasalahan penelitian dalam hal ini pembahasan tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi regional, pengeluaran pemerintah dan jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Aceh.

Bab V Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan daripada penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian serta saran yang perlu disampaikan agar menjadi bahan perbaikan bagi peneliti dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Otonomi Daerah

Otonomi daerah secara harfiah adalah berasal dari kata “Otonomi dan daerah”. Dalam bahasa Yunani, “*otoni*” berasal dari kata “*autos*” yang berarti “sendiri” dan “*nomos*” yang berarti "aturan dan undang-undang”. Dengan demikian otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna untuk mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah (Suharizal, 2017).

Menurut Ateng Syarifuddin (2015), otonomi daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, otonomi daerah sebagai kebebasan atau kemandirian yang dimiliki daerah tetapi bukan kemerdekaan, melainkan hanya kebebasan yang terbatas atau kemandirian yang terwujud melalui pemberian kesempatan yang harus dapat dipertanggung-jawabkan.

Amran Muslimin (2012), mengartikan otonomi daerah sebagai hak untuk mengatur dan memerintah daerah sendiri, dimana hak tersebut merupakan hak yang diperoleh dari pemerintah pusat. Sedangkan menurut Arif Nasution (2014) yang mengatakan bahwa otonomi daerah adalah pemerintahan oleh dan untuk rakyat di bagian wilayah nasional suatu negara secara informal berada di luar pemerintahan pusat.

Otonomi daerah adalah sistem pemerintahan yang memberikan kewenangan kepada daerah atau wilayah tertentu untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan mereka sendiri sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan lokal. Prinsip otonomi daerah bertujuan untuk memberikan kebebasan dan kemandirian bagi daerah dalam mengambil keputusan

terkait masalah-masalah yang berkaitan dengan pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan di wilayah mereka. Dalam sistem otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan, mengatur pelayanan publik, mengembangkan potensi wilayah, dan menjalankan program-program pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat. Namun, walaupun memiliki otonomi, daerah tetap terikat pada undang-undang nasional atau konstitusi negara yang mengatur batasan dan kewenangan dari pemerintah daerah.

Pengertian otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 juncto (jo.) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang pemerintahan daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa otonomi daerah diartikan sebagai sistem pemerintahan yang memberikan kewenangan kepada daerah atau wilayah tertentu untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan mereka sendiri sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan lokal. Prinsip otonomi daerah bertujuan untuk memberikan kebebasan dan kemandirian bagi daerah dalam mengambil keputusan terkait masalah-masalah yang berkaitan dengan pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan di wilayah mereka.

2.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya disebut PAD, adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Kurniawan

(2015), pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Dengan demikian, PAD dan kebijakan fiskal adalah dua hal yang saling terkait dalam pengelolaan keuangan pemerintahan daerah. PAD adalah salah satu komponen utama dalam kebijakan fiskal daerah, yang mempengaruhi kemampuan dan kemandirian daerah dalam mengelola anggaran dan membiayai program-program pembangunan dan pelayanan publik.

Baldric (2017), menyatakan bahwa PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sector ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Sedangkan menurut Carunia (2017), PAD dapat diartikan sebagai penerimaan yang berasal dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya.

2.2.2 Jenis dan Komponen Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari berbagai sumber yang ada di wilayah pemerintah daerah itu sendiri, diantaranya adalah dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil usaha milik daerah (BUMD), hasil penjualan aset daerah, bunga dan sumber pendapatan lainnya. Menurut Carunia (2017), pendapatan asli daerah dikatakan baik untuk memenuhi

pembiayaan pembangunan daerahnya apabila pencapaian persentasenya melebihi 70% dari total penerimaan PAD.

Menurut Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD; bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN; dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Selain sumber-sumber pendapatan yang telah disebutkan sebelumnya, pendapatan asli daerah (PAD) juga dapat berasal dari pendapatan lain-lain. Ini adalah kategori yang mencakup berbagai sumber pendapatan tambahan yang tidak termasuk dalam kategori pajak, retribusi, BUMD, hasil penjualan aset daerah, atau bunga. Jenis pendapatan lain-lain yang dapat menyumbang pada PAD di suatu daerah antara lain dari sumbangan, baik dari individu, badan usaha, maupun lembaga lain. Selanjutnya dari hasil investasi, hasil penjualan barang dan jasa, bantuan Pemerintah berupa transfer dana seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), dan berbagai jenis pendapatan lainnya.

Menurut Undang-Undang No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Undang-Undang No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah, pada Pasal 7 disebutkan bahwa dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang:

1. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; dan
2. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor.

2.2.3 Indikator Pendapatan Asli Daerah

Adapun indikator pendapatan asli daerah menurut ketentuan (Purnomo, 2019) adalah sebagai berikut:

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Pasal 6) bahwa Sumber Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah Sendiri yang sah :
 - a. Hasil Pajak Daerah (HPD)
 - b. Retribusi Daerah (RD)
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan/ Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah (PLPD)
 - d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (LPS)
2. Pendapatan berasal dari pemberian Pemerintah, yang terdiri dari :
 - a. Sumbangan dari pemerintah
 - b. Sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundangan
 - c. Pendapatan lain-lain yang sah

Rumus untuk menghitung Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu:

$$PAD = HPD + RD + PLPD + LPS \dots \dots \dots (2.1)$$

Keterangan :

PAD : Pendapatan Asli Daerah

HPD : Hasil Pajak Daerah

RD : Retribusi Daerah

PLPD : Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah

LPS : Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (LPS)

Peran PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah masih rendah. Kendatipun perolehan PAD setiap tahun relatif meningkat namun masih kurang mampu menggenjot laju pertumbuhan ekonomi daerah. Rendahnya potensi PAD disebabkan oleh beberapa faktor (Erry, 2015) yaitu:

1. Keterbatasan Potensi Ekonomi: Jika wilayah daerah memiliki potensi ekonomi yang terbatas, seperti keterbatasan sektor usaha yang berkembang atau rendahnya tingkat investasi dan pertumbuhan ekonomi, hal ini dapat mempengaruhi rendahnya potensi PAD.
2. Ketergantungan pada Transfer Pemerintah Pusat: Jika pemerintah daerah sangat mengandalkan transfer dana dari pemerintah pusat sebagai sumber utama PAD, maka rendahnya potensi PAD bisa terjadi jika transfer tersebut terbatas atau berkurang dari waktu ke waktu.
3. Kurangnya Potensi Pajak dan Retribusi: Daerah mungkin memiliki basis pajak dan retribusi yang terbatas, atau implementasi dan pengumpulan pajak tidak efektif, sehingga pendapatan dari pajak dan retribusi menjadi rendah.
4. Kurangnya Pemanfaatan Sumber Daya Alam: Jika daerah memiliki sumber daya alam yang potensial, namun belum dimanfaatkan secara optimal, ini dapat menyebabkan rendahnya potensi PAD dari sektor tersebut.

5. Keterbatasan dalam Mengelola Keuangan: Kurangnya kapasitas dan kemampuan dalam mengelola keuangan daerah dapat menyebabkan rendahnya potensi PAD karena kurangnya efisiensi dalam mengumpulkan dan mengelola pendapatan.
6. Perubahan Kebijakan Pusat: Perubahan kebijakan dari pemerintah pusat terkait pajak dan transfer keuangan dapat mempengaruhi potensi PAD daerah, terutama jika mengurangi sumber pendapatan yang biasa diperoleh oleh daerah tersebut.
7. Ketergantungan pada Sektor Tertentu: Jika daerah sangat mengandalkan satu sektor ekonomi atau satu jenis usaha, rendahnya diversifikasi ekonomi dapat menyebabkan potensi PAD menjadi terbatas.

Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah atau Pendapatan Asli Daerah (PAD). Beberapa langkah tersebut antara lain (Kustiawan, 2015) :

1. Perbaikan Pengelolaan Pajak dan Retribusi: Pemerintah daerah dapat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap sistem pengumpulan pajak dan retribusi. Upaya meningkatkan efisiensi pengelolaan dan penagihan pajak serta retribusi dapat membantu meningkatkan pendapatan daerah.
2. Perluasan Basis Pajak dan Retribusi: Pemerintah daerah dapat melakukan perluasan basis pajak dan retribusi dengan memastikan bahwa sebanyak mungkin warga atau entitas yang beroperasi di wilayahnya terlibat dalam pembayaran pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Promosi dan Pendekatan yang Baik kepada Wajib Pajak: Mengedukasi wajib pajak dan memberikan pendekatan yang baik serta pelayanan yang memuaskan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan mereka dalam membayar pajak.

4. Pengembangan Potensi Ekonomi: Pemerintah daerah harus berupaya mengembangkan potensi ekonomi wilayahnya dengan mendukung pertumbuhan sektor-sektor yang potensial, mengundang investasi, dan memfasilitasi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
5. Peningkatan Pendapatan dari BUMD: Pemerintah daerah dapat berusaha meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimilikinya untuk mendapatkan pendapatan yang lebih besar dari hasil usaha BUMD.
6. Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah: Pemerintah daerah harus memastikan pengelolaan aset daerah yang efektif dan efisien, termasuk dari penjualan atau penyewaan aset-aset yang tidak produktif atau tidak strategis.
7. Pengembangan Sumber Daya Alam: Jika daerah memiliki potensi sumber daya alam yang belum dimanfaatkan, pemerintah daerah harus mengelolanya secara berkelanjutan dan memastikan bahwa pendapatan dari sektor ini dapat maksimal.
8. Diversifikasi Sumber Pendapatan: Mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendapatan saja, dan sebaliknya, mencari dan mengembangkan berbagai sumber pendapatan yang lebih beragam.
9. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan anggaran, serta akuntabilitas dalam penggunaan dana publik, akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan potensi pendapatan dari sumbangan atau dana hibah.
10. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi: Memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti penggunaan aplikasi digital untuk pembayaran pajak, dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko kebocoran pendapatan.

Dalam UU No. 33 Tahun 2004, menyatakan bahwa dalam rangka meminimalkan kebocoran pemungutan pajak melalui peningkatan system pemungutan, sistem pengendalian, dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui pemberian insentif biaya pemungutan.

2.2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah

Ada banyak aspek yang bisa mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah, diantaranya adalah seperti dikemukakan Mardiasmo (2017) bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah adalah belanja modal dari daerah itu sendiri, semakin tinggi tingkat belanja modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD. Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah melibatkan pengeluaran untuk membiayai proyek pembangunan dan investasi dalam infrastruktur dan aset produktif lainnya. Tujuan dari belanja modal adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan publik serta mendukung pembangunan ekonomi di wilayah tersebut.

Selain itu, Santosa dan Rahayu (2015) mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah. Dengan didukung bukti empiris, pertumbuhan penduduk yang tinggi akan dapat menaikkan *output* melalui penambahan tingkat dan ekspansi pasar baik pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Penambahan penduduk bukanlah suatu masalah karena penambahan penduduk dapat pula menjadi faktor yang dibutuhkan dalam beberapa situasi dan konteks tertentu, terutama jika didukung dengan pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan kebijakan yang tepat. Dalam hal ekonomi, jika

wilayah atau negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi, penambahan penduduk bisa membantu meningkatkan tenaga kerja dan konsumen potensial, yang pada gilirannya dapat memicu lebih banyak investasi dan pengeluaran konsumsi.

Selain faktor di atas, terdapat beberapa faktor lain seperti bantuan dana yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah yaitu berupa dana perimbangan melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana Alokasi Umum (DAU) dirancang untuk membantu pemerintah daerah dalam membiayai belanja operasional mereka dan menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dasar yang meliputi pelayanan publik, biaya operasional, dan gaji pegawai. DAU merupakan salah satu bentuk transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah pusat yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan proyek atau program pembangunan tertentu di tingkat daerah. Dengan DAK, pemerintah pusat berupaya untuk mendukung pembangunan di daerah-daerah yang memiliki tantangan dan prioritas tertentu, sehingga dapat membantu mengatasi kesenjangan pembangunan antarwilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Adisasmita, 2016).

2.3. Pertumbuhan Ekonomi Regional

2.3.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi Regional

Pertumbuhan ekonomi regional dalam penelitian ini diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto yang selanjutnya disebut PDRB, yaitu

merupakan indikator penting untuk dapat mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan menggunakan dua data, yaitu dapat menggunakan data atas dasar harga berlaku ataupun data atas dasar harga konstan. Menurut Sukirno (2014), pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan output per kapita dalam jangka yang panjang, penekanannya ialah pada tiga aspek yakni proses, output per kapita, serta jangka panjang.

Menurut Boediono (2009), PDRB merupakan indikator pertumbuhan ekonomi dari proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Tekanannya pada tiga aspek, yaitu: proses, output perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya ada pada perubahan atau perkembangan itu sendiri.

Todaro (2010) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas tersebut dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, intitusional dan ideologi terhadap berbagai keadaan yang ada.

Menurut Adisasmita (2014), "pertumbuhan ekonomi dapat memberikan kontribusi perkembangan kesejahteraan masyarakat, hal ini karena pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah atau negara dalam periode waktu tertentu". Sehingga berdasarkan hal tersebut dapat diasumsikan bahwa ketika pertumbuhan ekonomi terjadi secara berkelanjutan, berbagai aspek kesejahteraan masyarakat dapat meningkat, seperti peningkatan pendapatan, pengurangan kemiskinan, akses terhadap layanan publik,

peningkatan pendidikan dan kesehatan dan peningkatan infrastruktur. Dengan kata lain, semakin tinggi nilai rasio dari PDRB pada suatu daerah maka ini menggambarkan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi serta menunjukkan bahwa daerah yang bersangkutan telah mengalami kemajuan dalam hal perekonomian.

2.3.2 Indikator Pertumbuhan Ekonomi Regional

PDRB atas dasar harga konstan dipakai untuk dapat mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya (Sukirno, 2014). Sedangkan menurut BPS (2016) PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasarnya. PDRB atas dasar harga berlaku dapat diperuntukkan sebagai gambaran untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan diperuntukkan melihat pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Menurut BPS (2016), salah satu indikator ekonomi makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian daerah setiap tahunnya ialah data PDRB. Ada tiga cara perhitungan PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendekatan Produksi: Mengukur PDB berdasarkan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua sektor ekonomi di wilayah tersebut. Pendekatan ini berfokus pada kegiatan produksi dan mencatat kontribusi nilai tambah setiap sektor ekonomi dalam menciptakan barang dan jasa akhir. Dengan menggunakan pendekatan ini, PDB dapat dihitung dengan menjumlahkan nilai

tambah dari seluruh sektor ekonomi seperti pertanian, industri, jasa, dan sektor lainnya.

2. Pendekatan Pendapatan: Mengukur PDB berdasarkan total pendapatan yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi di wilayah tersebut. Faktor-faktor produksi ini meliputi upah tenaga kerja, keuntungan perusahaan, bunga, dan sewa. Pendekatan ini memandang PDB sebagai jumlah total pendapatan yang diterima oleh masyarakat dan perusahaan dalam proses produksi barang dan jasa.
3. Pendekatan Pengeluaran: Mengukur PDB berdasarkan total belanja atau pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga, pemerintah, dan sektor bisnis dalam membeli barang dan jasa. Pendekatan ini melihat PDB sebagai jumlah permintaan atau belanja agregat di wilayah tersebut. Pendekatan pengeluaran memperhitungkan komponen pengeluaran seperti konsumsi rumah tangga, investasi perusahaan, belanja pemerintah, dan neto ekspor.

Menurut Julian (2011:), untuk menilai prestasi pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini peneliti mengambil hitungan pendapatan nasional riil yaitu PNB atau PDB yang dihitung menurut harga-harga yang berlaku dalam tahun dasar. Nilai yang diperoleh dinamakan PNB atau PDB harga tetap yaitu harga yang berlaku dalam tahun dasar. Adapun rumusnya adalah:

$$r(t-1) = \text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{\text{PDRBt} - \text{PDRB}(t-1)}{\text{PDRBt} - 1} \times 100\% \dots \dots (2.2)$$

Ket:

r 1 = Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

PDRBt = Produk Domestik Regional Bruto tahun yang dihitung

PDRBt 1 = Produk Domestik Regional Bruto tahun sebelumnya.

2.4. Pengeluaran Pemerintah

2.4.1 Pengertian Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah dalam hal ini adalah pengeluaran dari pemerintah daerah, yaitu semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (UU 33 tahun 2004). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi regional atau belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah.

Sedangkan dalam UU RI No 15 Tahun 2013, dapat dipahami bahwa pertumbuhan ekonomi regional termasuk ke dalam anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik itu untuk tingkat provinsi maupun untuk tingkat kabupaten dan kota. APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) pada hakekatnya adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang mencakup estimasi pendapatan yang akan diterima dan alokasi belanja yang akan dilakukan dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan instrumen pengaturan dan perencanaan keuangan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya dalam menyediakan pelayanan publik atau fasilitas publik dan membiayai berbagai program pembangunan.

Selanjutnya, Halim (2012), menyatakan bahwa lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat. Anggaran sektor publik pemerintah daerah dalam APBD merupakan output pengalokasian sumberdaya.

Halim (2012) menambahkan bahwa APBD merupakan suatu anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara rinci.
2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya yang sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut.
3. Adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan pada jenis kegiatan dan proyek yang telah dituangkan dalam bentuk angka periode anggaran, yaitu biasanya 1 (satu) tahun.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 14 APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Adapun menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung 1 Januari sampai 31 Desember. Sedangkan berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 9 APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang sering disebut dengan APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang memiliki beberapa unsur, seperti adanya rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara rinci, sumber penerimaan, adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan. APBD tersebut guna menjadi dasar pelaksanaan pelayanan

publik. Dalam penyusunannya APBD dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2.4.2 Jenis Pertumbuhan ekonomi regional

Halim (2012) mengemukakan bahwa terdapat beberapa jenis pertumbuhan ekonomi regional dalam bentuk belanja daerah, yaitu:

1. **Belanja Operasional:** Merupakan pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan rutin dalam menjalankan pemerintahan dan menyediakan pelayanan publik. Belanja operasional mencakup: Gaji pegawai dan tunjangan. Belanja barang dan jasa kantor (seperti alat tulis, peralatan, bahan habis pakai, dan sebagainya). Belanja bahan bakar dan energi (BBM). Belanja konsumsi rumah tangga (misalnya untuk kebutuhan kantor, rapat, dan sebagainya). Belanja subsidi (jika ada program subsidi tertentu). Serta belanja honorarium dan lain-lain.
2. **Belanja Pembangunan atau Belanja Modal:** Pengeluaran untuk membiayai proyek pembangunan infrastruktur dan program-program pembangunan lainnya. Belanja pembangunan mencakup: Pembangunan jalan, jembatan, dan infrastruktur transportasi lainnya. Pembangunan gedung sekolah, rumah sakit, atau fasilitas umum lainnya. Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi. Dan pembangunan proyek-proyek lain yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pembangunan wilayah.
3. **Belanja Tidak Terduga:** Merupakan alokasi dana untuk mengantisipasi kebutuhan mendesak atau keadaan tak terduga yang memerlukan anggaran tambahan. Belanja tidak terduga berguna untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, seperti bencana alam atau keadaan darurat lainnya.

4. Belanja Pembiayaan: Merupakan pengeluaran untuk membiayai defisit anggaran atau kegiatan tertentu yang tidak dapat ditutupi oleh pendapatan dan belanja reguler. Belanja pembiayaan bisa berasal dari penerimaan pinjaman atau hasil penjualan aset.
5. Belanja Penyertaan Modal: Merupakan pengeluaran untuk melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (BUMD) atau lembaga lainnya. Penyertaan modal bertujuan untuk meningkatkan permodalan BUMD atau lembaga tersebut.

2.5. Jumlah Penduduk

2.5.1 Pengertian Penduduk

Penduduk adalah sekelompok orang yang tinggal atau menetap dalam suatu wilayah atau negara. Dalam konteks geografi atau demografi, penduduk sering kali diartikan sebagai jumlah individu yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu pada suatu waktu tertentu. Menurut Mantra (2019), penduduk adalah orang dalam matryanya sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah tertentu.

Menurut BPS (2017), penduduk merupakan semua orang yang bertempat tinggal dan berdomisili dalam wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 (enam) bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 (enam) bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Sedangkan menurut Sunarto (2015), dalam ilmu sosiologi penduduk atau warga suatu negara atau daerah bisa didefinisikan menjadi dua, yaitu orang yang tinggal di daerah tersebut dan orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut atau orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal.

Sedangkan jumlah penduduk adalah mengacu pada total orang yang tinggal dalam wilayah tersebut. Jumlah penduduk ini dapat berubah dari

waktu ke waktu karena kelahiran, kematian, migrasi, dan perubahan dalam angka kelahiran dan kematian. Menurut BPS (2017:40) jumlah penduduk adalah sekumpulan orang yang bertempat tinggal atau berdomisili dalam suatu wilayah negara tertentu selama jangka waktu tertentu dan sudah memenuhi segala syarat-syarat yang berlaku di negara tersebut.

Hartono (2018:62), menjelaskan bahwa penduduk menjadi unsur pemacu pembangunan karena populasi yang lebih besar sebenarnya adalah pasar potensial yang menjadi sumber permintaan akan berbagai macam barang dan jasa yang kemudian akan menggerakkan berbagai macam kegiatan ekonomi sehingga menciptakan skala ekonomi dalam produksi yang akan menguntungkan semua pihak, menurunkan biaya produksi dan menciptakan sumber pasokan atau penawaran tenaga kerja murah dalam jumlah yang memadai sehingga pada gilirannya akan merangsang output atau produksi agregat yang lebih tinggi lagi, dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang berarti tingkat kemiskinan akan turun.

2.5.2 Kriteria Penduduk

Penduduk memiliki beberapa kriteria, dan menurut Bailah (2019) kriteria tersebut terbagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu kelompok usia produktif, usia non produktif dan belum produktif, dengan penjelasannya sebagai berikut:

1. Penduduk Usia Produktif

Penduduk usia produktif adalah kelompok penduduk dalam suatu wilayah yang berada pada rentang usia yang dianggap produktif, yaitu antara 15 hingga 64 tahun. Rentang usia ini dianggap kritis karena mayoritas orang pada kelompok ini berada pada usia yang

memungkinkan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam dunia kerja dan berkontribusi terhadap perekonomian.

2. Penduduk Usia NonProduktif

Kelompok ini terdiri dari orang-orang yang berusia di atas 64 tahun. Orang-orang pada kelompok usia ini sering disebut sebagai penduduk lanjut usia atau lansia. Pada usia ini, banyak dari mereka yang sudah memasuki masa pensiun dan telah mengakhiri masa kerja aktifnya. Penduduk usia lanjut ini cenderung mengandalkan penerimaan dari pensiun, asuransi, atau bantuan sosial dari pemerintah.

3. Penduduk Usia Belum Produktif

Kelompok ini terdiri dari anak-anak dan remaja yang berusia di bawah 15 tahun. Mereka belum mencapai usia produktif untuk bekerja dan berkontribusi secara langsung dalam perekonomian. Penduduk usia muda ini umumnya masih mengenyam pendidikan formal di sekolah atau memiliki tanggung jawab penuh dari orang tua atau keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2.5.3 Indikator Jumlah Penduduk

Menurut Hartono (2018), ada tiga alasan pertumbuhan penduduk yang tinggi akan memperlambat pembangunan, yaitu sebagai berikut:

1. Tekanan pada Sumber Daya: Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan meningkatkan permintaan terhadap sumber daya seperti air, tanah, dan energi. Jika daya dukung lingkungan dan kapasitas infrastruktur tidak dapat mengimbangi permintaan yang meningkat, maka tekanan pada sumber daya tersebut akan semakin besar. Hal ini dapat menyebabkan degradasi lingkungan, kelangkaan sumber daya, dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
2. Peningkatan Pengangguran: Pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan peningkatan jumlah angkatan kerja yang

melebihi permintaan pasar. Jika tidak ada cukup lapangan kerja yang tersedia, maka pengangguran akan meningkat. Tingginya angka pengangguran dapat menyulitkan masyarakat dalam memperoleh pekerjaan yang layak, mengakibatkan rendahnya tingkat pendapatan, dan menurunkan kualitas hidup.

3. Tantangan dalam Pendidikan dan Kesehatan: Pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menimbulkan tantangan dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Dengan adanya peningkatan jumlah anak yang harus bersekolah, sistem pendidikan harus mampu menampung semua siswa dan memberikan pendidikan yang berkualitas. Selain itu, ketersediaan layanan kesehatan juga perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan penduduk yang semakin besar.

Jika pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan pembangunan yang tepat dan kebijakan yang efektif, maka dapat menghambat kemajuan pembangunan suatu negara. Oleh karena itu, perencanaan keluarga, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan menjadi kunci untuk mengatasi dampak negatif pertumbuhan penduduk yang tinggi dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

2.6. Penelitian Sebelumnya

Sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang memiliki karakteristik hampir sama dengan penelitian ini, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan Abdul (2017). Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Tengah, yang menjadi subjek penelitian ini adalah 29 kabupaten dan 6 kotamadya. Penelitian ini menggunakan metode dan model penelitian regresi linier berganda. Hasil penelitian ini diketahui bahwa jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten /kota di Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian sejenis lainnya juga dilakukan Sarinah (2016). Penelitian ini mengambil tempat di Provinsi Jawa Timur, yang menjadi subjek penelitian ini adalah 29 kabupaten dan 9 kotamadya. Metode dan variabel penelitian yang dilakukan Sarinah sama dengan penelitian ini, dimana tujuannya adalah untuk melihat pengaruh jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Timur. Hasil dari penelitian yang dilakukan Sarinah ini, diketahui bahwa jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Timur.

Selain itu, Mia Rahamawati (2016), dengan penelitian yang berjudul "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal Terhadap dan Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Provinsi Papua dan Papua Barat", menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi dan belanja modal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Made Juaiawan (2016), dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh Jumlah Penduduk, DAU dan DAK Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali", menemukan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan DAU umum dan DAK berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah.

Terakhir Syahputra (2015), dalam penelitiannya di provinsi Jambi, dengan subjek penelitian 9 kabupaten dan 2 kotamadya. Penelitian tentang pengaruh jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah ini juga sama dengan peneliti yang peneliti lakukan, yaitu menggunakan metode survey dan model regresi. Penelitian Syahputra ini menemukan bahwa jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jambi.

Untuk lebih jelasnya, deskriptif mengenai penelitian sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Abdul (2017)	Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah 2010-2014	Jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah	jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah	Memiliki variabel independent dan dependent yang sama, namun berbeda pada tempat, waktu dan objek penelitian
2.	Sarinah (2016)	Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Provinsi Riau	Jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah	jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif secara signifikan terhadap PAD	Memiliki variabel independent dan dependent yang sama, namun berbeda pada tempat, waktu dan objek penelitian
3.	Mia Rahamawati (2018)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Provinsi Papua dan Papua Barat	Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal dan PAD	Pertumbuhan Ekonomi dan belanja modal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap PAD	Variabel Y sama, namun berbeda dengan variabel X yaitu pada variabel belanja modal. Serta berbeda pada tempat, waktu dan subjek penelitian

Lanjutan Tabel 2.1

4.	Made Juaiawan (2018)	Pengaruh Jumlah Penduduk, DAU dan DAK Terhadap PAD Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali	Jumlah Penduduk, DAU, DAK dan PAD	Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap PAD, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap PAD	Variabel Y sama, namun sedikit berbeda dengan variabel X yaitu pada variabel PAD. Serta berbeda pada tempat, waktu dan subjek penelitian
5.	Syahputra (2015)	Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi	Jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah	jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah	Memiliki variabel independent dan dependent yang sama, namun berbeda pada tempat, waktu dan objek penelitian

Sumber: Penelitian (2023)

2.7. Keterkaitan Variabel

2.7.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Regional dengan Pendapatan Asli Daerah

Sukirno (2014), mengemukakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi indikator pertumbuhan ekonomi regional yang pada umumnya digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi (pertumbuhan ekonomi). PRDB menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya, apabila PRDB disuatu daerah mengalami peningkatan artinya pertumbuhan ekonomi daerah tersebut meningkat. Suatu daerah yang tingkat pertumbuhannya tinggi

senantiasa lebih disukai oleh para investor untuk melakukan investasi. Hal ini terjadi karena dampak dari kemampuan suatu daerah dalam melakukan pengelolaan sumber daya yang dimilikinya. Selain itu, hal ini menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah setempat untuk meningkatkan pendapatan daerahnya tersebut. Dengan kata lain, seiring peningkatan PDRB maka semakin tinggi kapasitas fiskal daerah yang sehingga tingkat kemandirian keuangan daerah meningkat.

Pertumbuhan ekonomi yang identik dengan indikator PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah. Hal ini dilihat, dimana PDRB merupakan penjumlahan nilai output bersih yang diperoleh dari kegiatan ekonomi suatu daerah dan dalam kurun waktu tertentu. PDRB merupakan indikator pertumbuhan ekonomi, yang secara langsung juga berpengaruh terhadap PAD (BPS, 2016).

Selanjutnya hal ini juga diperkuat Adisasmita (2014), yang memberikan pernyataan bahwa nilai PDRB atau pendapatan perkapita yang diperoleh dari berbagai pendapatan nasional bruto atau dari pendapatan domestik bruto pada suatu tahun atau periode tertentu dengan jumlah produk pada tahun tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat untuk membayar pengeluarannya termasuk mengkonsumsi barang dan jasa, semakin besar tingkat pendapatan perkapita masyarakat mempunyai pengaruh positif dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kesejahteraan dan tingkat kemakmuran dari suatu negara atau suatu wilayah. Indikator ini mengacu pada jumlah total pendapatan yang diperoleh oleh suatu negara atau wilayah dan dibagi dengan jumlah penduduk yang ada dan tinggal di wilayah tersebut. Hasil perhitungan tersebut memberikan gambaran tentang rata-rata pendapatan per orang dalam suatu wilayah tertentu.

Pendapatan per kapita menjadi penting karena memberikan informasi tentang distribusi ekonomi dan kemampuan ekonomi masyarakat.

Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka akan semakin tinggi pula kemampuannya untuk membeli atau mengonsumsi barang dan jasa. Konsep ini sering disebut sebagai "efek pendapatan" dalam ilmu ekonomi. Efek pendapatan menggambarkan hubungan positif antara pendapatan individu atau masyarakat dengan permintaan barang dan jasa. Ketika pendapatan meningkat, orang cenderung memiliki lebih banyak uang untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Hal ini menyebabkan kenaikan permintaan atas berbagai produk dan layanan. Selain itu, menurut teori Rostow, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan perubahan dalam kehidupan masyarakat, yaitu perubahan politik, struktur sosial, nilai sosial, dan struktur kegiatan perekonomiannya.

2.7.2 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dengan Pendapatan Asli Daerah

Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Pemerintah daerah diberi keleluasan dan kesempatan dengan secara luas untuk dapat melakukan pengembangan dan pembangunan daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing-masing. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah suatu bentuk penerimaan yang berasal dari daerah, dimana penerimaan tersebut bersumber dan dikelola oleh daerahnya masing-masing. PAD adalah penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yang merupakan hak pemerintah daerah. PAD terdiri dari Hasil Pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil usaha milik daerah dan pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan dari daerah yang digunakan untuk mengelola daerahnya secara mandiri.

Salah satu langkah yang dapat menjadi solusi peningkatan pelayanan publik yaitu dengan mengalokasikan belanja pada investasi modal. Mardiasmo (2012) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tingginya aktivitas investasi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi, dan pada gilirannya memberikan pemasukan yang signifikan bagi pemerintah daerah setempat.

Pertumbuhan ekonomi regional dalam hal ini adalah dalam bentuk belanja daerah yaitu pengeluaran atau penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kegiatan dan program yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Belanja daerah merupakan salah satu unsur penting dalam APBD dan merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik, meningkatkan infrastruktur, dan mendukung pembangunan di wilayahnya. Belanja daerah ini terdiri dari dua kategori yaitu belanja daerah langsung dan belanja tidak langsung.

2.7.3 Pengaruh Jumlah Penduduk dengan Pendapatan Asli Daerah

Selanjutnya, jumlah penduduk juga mempengaruhi pendapatan asli daerah. Pertumbuhan penduduk bukanlah suatu masalah, namun di sisi lain, beberapa pendapat menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk juga dapat dianggap sebagai peluang atau potensi untuk pembangunan, tergantung pada bagaimana pertumbuhan tersebut dikelola dan diberdayakan. Penduduk yang lebih banyak juga berarti lebih banyak tenaga kerja dan pasar konsumen potensial, yang dapat menjadi dorongan bagi pertumbuhan ekonomi. Adam Smith juga berpendapat dengan didukung bukti empiris bahwa pertumbuhan penduduk tinggi akan output melalui penambahan

tingkat dan ekspansi pasar baik pasar dalam negeri maupun luar negeri. Penambahan penduduk yang tinggi dan disertai oleh adanya perubahan teknologi dan pemberdayaan manusia akan banyak bermunculan ide-ide baru dan tenaga ahli.

Smith berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk tinggi akan dapat meningkatkan output melalui penambahan tingkat dan ekspansi pasar. Penambahan penduduk merupakan suatu hal yang di butuhkan dan bukan suatu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Besarnya penduduk dapat mempengaruhi pendapatan. Jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat ditarik juga meningkat, semakin banyaknya jumlah penduduk maka pendapatan asli daerah akan semakin meningkat dari banyaknya iuran dari penduduk seperti pajak daerah atau retribusi daerah.

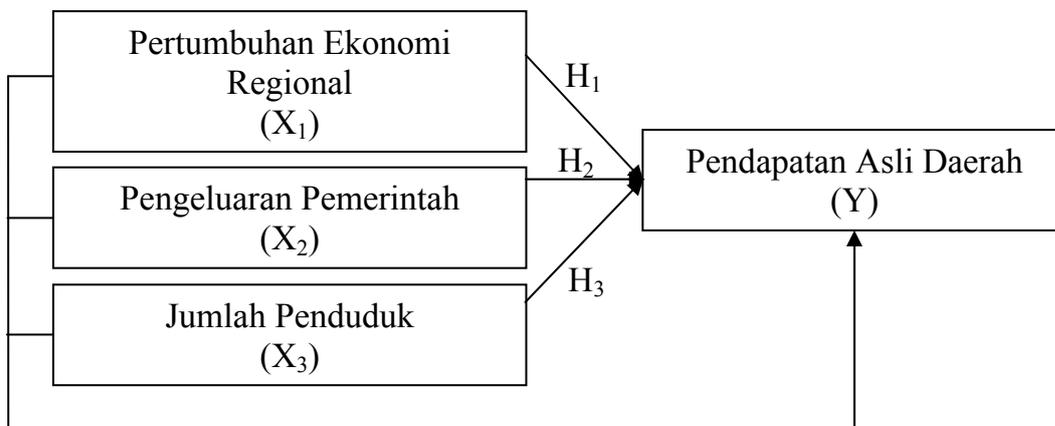
Penelitian yang dilakukan oleh Susanto (2013) berpengaruh signifikan karena terdapat penduduk yang bekerja atau penduduk yang produktif yaitu mulai bekerja seperti pertanian, perdagangan, konstruksi, keuangan, jasa-jasa dan lain sebagainya, semua itu jumlah penduduk yang sudah mempunyai pendapatan sendiri atau bisa dikatan jumlah penduduk mampu untuk menyumbang pendapatannya ke pemerintah daerah, penarikan pajak.

Pertumbuhan penduduk juga merangsang pertumbuhan ekonomi, semakin besar jumlah penduduk akan mengakibatkan meningkatnya permintaan terhadap barang-barang konsumsi, selanjutnya akan mendorong *economic of scale* dalam berproduksi, sehingga akan menurunkan biaya produksi, dan pada akhirnya akan mempengaruhi pendapatan asli daerah, dengan meningkatnya jumlah penduduk akan meningkatkan permintaan terhadap barang-barang konsumsi, hal ini selanjutnya dapat mendorong peningkatan produksi sehingga akan mengakibatkan adanya perluasan dan pendirian usaha baru pada sektor produksi.

Selanjutnya, pendirian usaha baru juga akan menambah angkatan kerja baru yang bekerja ditempat usaha baru tersebut, sehingga dalam hal ini tingkat pendapatan masyarakat akan cenderung meningkat, dengan adanya kecenderungan penambahan penduduk pada gilirannya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

2.8. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual akan teori yang saling berhubungan satu sama lain terhadap berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 2017). Dalam hal ini, tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh pertumbuhan ekonomi regional, pengeluaran pemerintah dan jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Aceh. Sehingga kerangka berpikir yang terbentuk adalah sebagaimana terlihat pada Gambar 2.1 berikut ini.



Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran

2.9. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah dugaan sementara dari kebenaran pada suatu penelitian (Arikunto, 2018). Selanjutnya, bertitik tolak dari rumusan masalah dan kerangka konsep maka dirumuskan hipotesis penelitian ini adalah:

- H1 : Pertumbuhan ekonomi regional berpengaruh terhadap Pendetapan Asli Daerah di Provinsi Aceh.
- H2 : Pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap Pendetapan Asli Daerah di Provinsi Aceh.
- H3 : Jumlah penduduk berpengaruh terhadap Pendetapan Asli Daerah di Provinsi Aceh.
- H3 : Pertumbuhan Ekonomi Regional, Pendapatan Asli Daerah dan Jumlah penduduk berpengaruh Positif terhadap Pendetapan Asli Daerah di Provinsi Aceh.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah berbentuk sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya (Sugiyono, 2017). Penelitian ini mengacu pada rancangan penelitian yang telah dikemukakan oleh Sekaran (2017), dimana penelitian ini ingin menentukan penyebab atas permasalahan yang terjadi. Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini tergolong dalam penelitian asosiatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan yang terjadi antar dua variabel atau lebih.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang penulis gunakan pada penelitian dan penulisan skripsi ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, seperti laporan keuangan, struktur organisasi, dan lain-lain. Dalam hal ini data tersebut berupa laporan realisasi anggaran (LRA) pada APBD provinsi aceh, yang peneliti peroleh dari website resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan juga dari website resmi World Bank Indonesia, yaitu <https://www.worldbank.org/in/country/indonesia>, serta data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang juga bersumber dari website yang sama. Sedangkan data jumlah penduduk Provinsi Aceh bersumber dari BPS Provinsi Aceh tahun 1990-2022.

Penelitian ini bersifat studi kausal, studi kausal adalah studi dimana peneliti ingin menemukan penyebab dari satu atau lebih masalah. Masalah

yang terjadi dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh ini berpotensi dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi regional, pengeluaran pemerintah dan jumlah penduduk.

Penelitian ini masuk ke dalam kategori pengujian hipotesis, yaitu penelitian sifatnya menjelaskan hubungan antar variabel tertentu, atau menentukan perbedaan antar kelompok atau kebebasan dua atau lebih faktor dalam suatu situasi (Sekaran, 2017). Pengujian hipotesis yang dilakukan adalah menguji variabel bebas yaitu, pertumbuhan ekonomi regional, pengeluaran pemerintah dan jumlah penduduk, serta pengaruhnya terhadap variabel dependent, yaitu pendapatan asli daerah.

3.3. Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2017) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya. Selanjutnya untuk mencukupi sampel penelitian dan menyesuaikan dengan sistem otonomi daerah, maka berdasarkan pendapat tersebut, yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Laporan Data Keuangan Anggaran Perbelanjaan Daerah (APBD) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun anggaran 1990 sampai dengan 2022 dari Pemerintah Aceh.

Data penelitian ini merupakan *pooled data* yang bersifat kuantitatif. Menurut Jogiyanto (2012) panel data atau *pooled data* adalah gabungan dari data yang melibatkan satu waktu tertentu dengan banyak sampel (*cross sectional*) dan data yang melibatkan urutan waktu (*time series*). Selanjutnya yang menjadi sampel atau subjek dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Aceh Tahun 1990-2022, data PDRB Provinsi Aceh periode tahun 1990-2022 dan juga data jumlah penduduk berdasarkan

sensus pada BPS Provinsi Aceh tahun 1990-2022. Sedangkan objek penelitian ini adalah berupa data realisasi anggaran APBD, data PDRB dan data jumlah penduduk Provinsi Aceh periode tahun 1990-2022, sehingga dengan rentang tahun 1990-2022, maka subjek pengamatan atau yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 33 observasi.

3.4. Variabel Penelitian

3.4.1 Variabel Terikat (*Dependent*)

Variabel dependen atau variabel terikat yang merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Peengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

3.4.2 Variabel Bebas (*Independen*)

Variabel independen dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi (X1), yaitu pertumbuhan ekonomi yang diukur berdasarkan indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Variabel selanjutnya adalah pengeluaran pemerintah (X2), yaitu pengeluaran yang menjadi semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Variabel terakhir adalah jumlah penduduk (X3), yaitu sekumpulan orang yang bertempat tinggal atau berdomisili di suatu wilayah negara selama jangka waktu tertentu dan sudah memenuhi syarat-syarat yang berlaku di negara atau wilayah tersebut. Dalam penelitian ini rasio pertumbuhan ekonomi regional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha berdasarkan harga berlaku dapat dilihat dari Katalog Laporan PDRB Provinsi Aceh terbitan BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Aceh, Tahun Anggaran 1990-2022.

3.5. Definisi Operasional Variabel

Berikut ini merupakan penjelasan dari masing-masing variabel independen tersebut.

Tabel 3.1
Definisi dan Operasional Variabel Penelitian

No	Variabel	Definisi Variabel	Satuan	Sumber Data
1.	PAD (Y)	Menggunakan data jumlah pendapatan asli daerah Provinsi Aceh periode 1990-2022	Milyar rupiah	Word Bank
2.	Pertumbuhan ekonomi regional (X ₁)	Menggunakan data jumlah pendapatan asli daerah Provinsi Aceh periode 1990-2022	Milyar rupiah	Word Bank
2.	Pengeluaran pemerintah (X ₂)	Menggunakan data jumlah pendapatan asli daerah Provinsi Aceh periode 1990-2022	Milyar rupiah	Word Bank
3.	Jumlah Penduduk (X ₃)	Menggunakan data jumlah pendapatan asli daerah Provinsi Aceh periode 1990-2022	Jutaan jiwa	BPS Aceh

Sumber : Olahan penulis (2023)

3.6. Teknik Analisis Data

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda dengan persamaan umum sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \dots + \beta_n X_n + e \dots (3.1)$$

Berdasarkan persamaan 3.1 tersebut, maka model regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Dimana : } Y = \alpha + \beta_1\text{PER} + \beta_2\text{GE} + \beta_3\text{PDDK} + e \dots \dots (3.2)$$

Keterangan :

- Y = Pendapatan Asli Daerah
- α = Konstanta
- PER = Pertumbuhan Ekonomi Regional
- GE = Pengeluaran Pemerintah
- PDDK = Jumlah Penduduk
- β_1, β_2 dan β_3 = Koefisien regresi
- e = *Error term*

3.7. Pengujian Hipotesis

3.7.1 Hipotesis yang diajukan

Untuk menerima atau menolak ketiga hipotesis dalam penelitian ini, maka dilihat hasil output SPSS. Output tersebut ke kriteria menerima atau menolak hipotesis. Kriteria ini berpedoman pada Gani (2015) dan Supranto (2017). Paparan kriteria menerima atau menolak hipotesis akan diuraikan berikut ini:

1. H_{a1} : Diduga pertumbuhan ekonomi regional, pengeluaran pemerintah dan jumlah penduduk berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh tahun 1990-2022
2. H_{a2} : Diduga pertumbuhan ekonomi regional berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh tahun 1990-2022
3. H_{a3} : Diduga pengeluaran pemerintah berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada

Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Aceh tahun 1990-2022

4. H_{a_4} : Diduga jumlah penduduk berpengaruh secara simultan terhadap Pendatapan Asli Daerah Provinsi Aceh tahun 1990-2022

3.7.2 Secara Simultan (uji-F)

Pengujian ini dilakukan dengan uji Statistik F dengan kriteria : Terima H_0 bila $F\text{-hitung} \leq F\text{-tabel}$ dan Tolak H_0 (terima H_1) bila $F\text{ hitung} \geq F\text{ tabel}$. Dengan menggunakan *SPSS Versi 22* akan dilihat pada tabel ANOVA ataupun dengan membandingkan sig. F dengan *level of test* (α) dengan ketentuan Terima H_0 bila $\text{sig. F} \geq \alpha$ dan Tolak H_0 (Terima H_1) bila $\text{sig. F} \leq \alpha$.

3.7.3 Secara Parsial (uji-t)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependent. Yang menjadi kriteria dalam pengujian hipotesis ini adalah :

- H_{o_1} : Jika nilai probabilitas $t > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya pertumbuhan ekonomi regional berpengaruh terhadap Pendatapan Asli Daerah Provinsi Aceh tahun 1990-2022
- H_{a_1} : Jika nilai probabilitas $t < 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya pertumbuhan ekonomi regional tidak berpengaruh terhadap Pendatapan Asli Daerah Provinsi Aceh tahun 1990-2022

- Ho₂ : Jika nilai probabilitas $t > 0,05$ maka Ho diterima dan Ha ditolak. Artinya PDRB berpengaruh terhadap Pendatapan Asli Daerah Provinsi Aceh tahun 1990-2022
- Ha₂ : Jika nilai probabilitas $t < 0,05$ maka Ho diterima dan Ha ditolak. Artinya PDRB tidak berpengaruh terhadap Pendatapan Asli Daerah Provinsi Aceh tahun 1990-2022
- Ho₃ : Jika nilai probabilitas $t > 0,05$ maka Ho diterima dan Ha ditolak. Artinya jumlah penduduk berpengaruh terhadap Pendatapan Asli Daerah Provinsi Aceh tahun 1990-2022
- Ha₃ : Jika nilai probabilitas $t < 0,05$ maka Ho diterima dan Ha ditolak. Artinya jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap Pendatapan Asli Daerah Provinsi Aceh tahun 1990-2022

Uji parsial ini disebut dengan uji t, dengan uji ini apakah hipotesis yang digunakan diterima atau ditolak dengan ketentuan apabila hasil uji t-hitung ($\alpha = 0,05$) lebih besar dari t-tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima, dan sebaliknya

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Provinsi Aceh

Pada akhir tahun 1949 Keresidenan Aceh dikeluarkan dari Propinsi Sumatera Utara dan selanjutnya ditingkatkan statusnya menjadi Propinsi Aceh. Teungku Muhammad Daud Beureueh yang sebelumnya sebagai Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo diangkat menjadi Gubernur Propinsi Aceh. beberapa waktu kemudian, berdasarkan Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950 propinsi Aceh kembali menjadi Keresidenan sebagaimana halnya pada awal kemerdekaan. Perubahan status ini menimbulkan gejolak politik yang menyebabkan terganggunya stabilitas keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat. Keinginan pemimpin dan rakyat Aceh ditanggapi oleh Pemerintah sehingga dikeluarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan kembali propinsi Aceh yang meliputi seluruh wilayah bekas keresidenan Aceh.

Berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah pada masa lalu yang menitik beratkan pada sistem yang terpusat dipandang sebagai sumber bagi munculnya ketidakadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kondisi yang demikian ini memunculkan pergolakan. Hal ini ditanggapi oleh pemerintah pusat dengan pemberian Otonomi Khusus dengan disahkannya Undang-Undang no. 18 tahun 2002 dan Propinsi Daerah Istimewa Aceh berubah menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kemudian berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2009 tentang Penggunaan Sebutan Nama Aceh dan Gelar Pejabat Pemerintahan dalam Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Aceh tertanggal 7 April 2009, ditegaskan bahwa sebutan Daerah Otonom, Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, Nomenklatur dan Papan Nama Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), Titelatur Penandatanganan, Stempel Jabatan dan Stempel Instansi dalam Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Aceh, diubah dan diseragamkan dari sebutan/ nomenklatur "Nanggroe Aceh Darussalam" atau disingkat menjadi "NAD" menjadi sebutan/ nomenklatur "Aceh". Ini dilakukan sambil menunggu ketentuan dalam Pasal 251 UU Pemerintahan Aceh yang menyatakan bahwa nama Aceh sebagai provinsi dalam sistem NKRI, akan ditentukan oleh DPRA hasil Pemilu 2009.

Provinsi Aceh terletak antara 01o 58' 37,2" - 06o 04' 33,6" Lintang Utara dan 94o 57' 57,6" - 98o 17' 13,2" Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 125 meter di atas permukaan laut. Pada tahun 2012 Provinsi Aceh dibagi menjadi 18 Kabupaten dan 5 kota, terdiri dari 289 kecamatan, 778 mukim dan 6.493 gampong atau desa. Batas-batas wilayah Provinsi Aceh, sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan dengan Provinsi Sumatera Utara dan sebelah Barat dengan Samudera Indonesia. Satu-satunya hubungan darat hanyalah dengan Provinsi Sumatera Utara, sehingga memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan Provinsi Sumatera Utara. Luas Provinsi Aceh 56.770.81 km², dengan hutan sebagai lahan terluas yang mencapai 22.908.74 km², diikuti lahan perkebunan rakyat seluas 8.005.53 km². Sedangkan lahan industri mempunyai luas terkecil yaitu 3.928 km².

4.2. Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi regional, pengeluaran pemerintah dan Jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Aceh periode tahun 1990-2022. Selanjutnya, analisis dilakukan sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan. Penelitian ini menggunakan time series selama 33 tahun pengamatan (dari tahun 1990-2022), sehingga jumlah sampel sasaran

penelitian menjadi 33 observasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode regresi linear berganda (*multiple regression analysis*) dan pengujian hipotesis sesuai dengan rancangan pengujian hipotesis yang diolah dengan menggunakan program SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*) 22.0 for Windows Evolution Version.

4.2.1 Statistik Deskriptif

Berdasarkan data terdahulu pada Bab 3 telah dibahas mengenai rancangan pembuktian untuk mengetahui hipotesis kerja (H_a) ini yaitu pengaruh pertumbuhan ekonomi regional, pengeluaran pemerintah dan Jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Aceh. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik deskriptif dengan menggunakan software *SPSS versi 22.0* dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan pengujian analisis regresi berganda. Prosedur dimulai dengan memasukkan variabel-variabel penelitian yaitu variabel bebas pertumbuhan ekonomi regional, pengeluaran pemerintah dan jumlah penduduk dan variabel terikat pendapatan asli daerah. Adapun data penelitian dapat disajikan pada halaman berikut ini.

Tabel 4.1
Deskripsi Variabel Penelitian

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	33	24,714	2,698,912	805,216.15	932,246.942
Pertumbuhan Ekonomi Regional	33	7,238	140,948	68,427.45	46,589.919
Pengeluaran Pemerintah	33	294,208	17,314,42 6	5,685,624.0 6	5,881,071.25 4
Jumlah Penduduk	33	3,416	5,808	4,408.64	645.597
Valid N (listwise)	33				

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat nilai terendah, tertinggi, rata-rata, dan standar deviasi dari variabel yang diteliti dengan jumlah objek sasaran yaitu 33, observasi. Pada variabel independen pertumbuhan ekonomi regional (X_1), yaitu pertumbuhan ekonomi dalam bentuk PDRB, terlihat bahwa nilai terendah variabel pertumbuhan ekonomi regional 7,238 milyar rupiah yang terdapat pada tahun 1990. Sedangkan pertumbuhan ekonomi regional tertinggi adalah sebesar 140,948 milyar rupiah, yang terdapat pada tahun 2022.

Pada variabel independen selanjutnya, yaitu variabel pengeluaran pemerintah (X_2) yang menggambarkan pengeluaran dalam bentuk belanja daerah, dapat dilihat bahwa nilai terendah variabel pengeluaran pemerintah adalah sebesar 294,208 milyar rupiah yang terdapat pada tahun 1990. Sedangkan pengeluaran pemerintah tertinggi adalah sebesar 17,314 triliun rupiah yang terdapat pada tahun 2016.

Variabel independent yang terakhir adalah variabel jumlah penduduk (X_3) yang merupakan total jiwa yang menempati dan tinggal Provinsi Aceh, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk terendah dari variabel jumlah penduduk adalah sebesar 3,416 jiwa yang terdapat pada tahun 1990. Sedangkan jumlah penduduk tertinggi adalah sebesar 5,808 jiwa yang terdapat pada tahun 2022

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu variabel pendapatan asli daerah (Y), yaitu semua pendapatan sah daerah yang diterima daerah. Pada Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa nilai pendapatan asli daerah terendah adalah sebesar Rp. 24,714 milyar rupiah, dan terdapat pada tahun 1990. Sedangkan nilai pendapatan asli daerah tertinggi adalah sebesar 2,698 triliun rupiah, yang diperoleh pada tahun 2019.

4.2.2 Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian pengaruh pertumbuhan ekonomi regional, pengeluaran pemerintah dan jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah, baik secara bersama-sama maupun secara parsial menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS 22.0 for Windows Evolution Version, hasil regresi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Hasil Regresi Linier Berganda

Nama Variabel	B	Standar Error	t_{hitung}	Sig
Konstanta (a)	5,073	1,758	2,886	0,034
Pertumbuhan ekonomi regional	0,467	0,120	3,892	0,011
pengeluaran pemerintah	0,140	0,031	4,506	0,000
Jumlah penduduk	0,492	0,196	2,510	0,039

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil output komputer melalui program SPSS, maka diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = 5,073 + 0,467 (X_1) + 0,140 (X_2) + 0,492 (X_3)$$

Dari persamaan regresi di atas dapat dijelaskan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Koefisien Regresi (β)

- Koefisien konstanta atau ketetapan yang diperoleh dari variabel bebas dan variabel terikat adalah sebesar 5,073. Artinya bila mana variabel pendapatan asli daerah (Y) dianggap konstan, maka besarnya pengaruh dari pertumbuhan ekonomi regional,

pengeluaran pemerintah dan jumlah penduduk adalah sebesar 5,073.

- Besarnya koefisien variabel pertumbuhan ekonomi regional sebesar 0,467 artinya setiap kenaikan 100% perubahan dalam variabel pertumbuhan ekonomi regional secara relatif akan meningkatkan nilai pendapatan asli daerah sebesar 0,467 atau sebesar 46,7% dengan asumsi variabel pengeluaran pemerintah dianggap konstan.
- Besarnya koefisien variabel pengeluaran pemerintah sebesar 0,140 artinya setiap kenaikan 100% perubahan dalam variabel pengeluaran pemerintah secara relatif akan meningkatkan nilai Pendapatan asli daerah sebesar 0,140 atau sebesar 14% dengan asumsi variabel jumlah penduduk dianggap konstan.
- Besarnya koefisien variabel jumlah penduduk sebesar 0,492 artinya setiap kenaikan 100% perubahan dalam variabel jumlah penduduk secara relatif akan meningkatkan nilai Pendapatan asli daerah sebesar 0,492 atau sebesar 49,2% dengan asumsi variabel pertumbuhan ekonomi regional dianggap konstan.

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat diketahui bahwa tiga variabel yang diteliti, variabel yang paling besar memberi pengaruh terhadap pendapatan asli daerah adalah variabel pertumbuhan ekonomi regional (X_1) dengan nilai koefisien sebesar 0,492 atau 49,2%

2. Koefisien korelasi (R) dan determinasi (R^2)

Hubungan dan pengaruh variabel bebas terhadap harga saham berdasarkan korelasi dan determinasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3
Tabel Model Summary

R	R²	Adjusted R²	Std. Error of the estimate
0,948	0,899	0,888	311,788

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat besarnya koefisien determinasi (R^2) adalah sebesar 0,899. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi regional (X_1), pengeluaran pemerintah (X_2) dan Jumlah penduduk (X_3) mempengaruhi pendapatan asli daerah sebesar 89,9% sedangkan selebihnya sebesar 10,1%, dipengaruhi oleh faktor-faktor dari variabel lain di luar dari pada yang menjadi variabel penelitian ini, seperti faktor dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dana bagi hasil.

3. Pengujian Secara Simultan (Uji-F)

Uji simultan dilakukan dengan cara komputerisasi menggunakan program SPSS versi 22.0, yang bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yaitu Pertumbuhan ekonomi regional (X_1), pengeluaran pemerintah (X_2) dan Jumlah penduduk (X_3) mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan asli daerah, seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.4
Analisis of Variance (Anova)

Model	Sum of Squares	df	Mean Squares	F_{hitung}	F_{tabel}	Sig
Regresi	24991545821720,523	3	8330515273906,841	85,694	2,934	0,000
Residual	2819153707555,715	29	97212196812,266			
Total	27810699529276,240	32				

Sumber : Data diolah, 2023

Pengujian dilakukan dengan Anova yang membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} . Tabel 4.4 menunjukkan F_{hitung} sebesar 85,694 sedangkan F_{tabel} pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ adalah sebesar 2,934. Dari perhitungan tersebut memperlihatkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($85,694 > 2,934$). Besarnya nilai F_{hitung} daripada F_{tabel} , ini dikarenakan besarnya pengaruh pertumbuhan ekonomi regional (X_1), pengeluaran pemerintah (X_2) dan jumlah penduduk (X_3) terhadap Pendapatan asli daerah, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi regional (X_1), pengeluaran pemerintah (X_2) dan jumlah penduduk (X_3), secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi pendapatan asli daerah secara signifikan.

Dengan demikian terbukti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari pertumbuhan ekonomi regional (X_1), pengeluaran pemerintah (X_2) dan jumlah penduduk (X_3) terhadap pendapatan asli daerah (Y) Provinsi Aceh periode tahun 1990-2022.

4. Pengujian Secara Parsial (Uji-t)

Uji parsial dalam penelitian ini diolah menggunakan program SPSS versi 22.0, yang bertujuan untuk menguji kemaknaan parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} , pada taraf signifikansi $\alpha = 5\%$. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini:

Tabel 4.6
Uji Parsial (t-test)

No	Variabel Independen	t-hitung	t-tabel	Sig.
1.	Pertumbuhan ekonomi regional (X_1)	3,892	2,035	0,011
2.	pengeluaran pemerintah (X_2)	4,506	2,035	0,000
3.	Jumlah penduduk (X_3)	2,510	2,035	0,039

Sumber : Data diolah, 2023

Pada tabel di atas menunjukkan variabel-variabel faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah (Y) Provinsi Aceh periode tahun 1990-2022, secara parsial, mempengaruhi pendapatan asli daerah. Hasil penelitian terhadap variabel pertumbuhan ekonomi regional (X_1) diperoleh t_{hitung} (3,892) dan t_{tabel} (2,035). Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan signifikansi sebesar 0,011 atau pertumbuhan ekonomi regional (X_1) di bawah $\alpha = 5\%$. Sehingga hal ini dapat diartikan secara parsial pertumbuhan ekonomi regional (X_1) berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah (Y) Provinsi Aceh periode tahun 1990-2022.

Selanjutnya pada variabel pengeluaran pemerintah (X_2) diperoleh t_{hitung} (4,506) dan t_{tabel} (2,035). Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan signifikansi sebesar 0,000 atau pengeluaran pemerintah (X_2) di bawah $\alpha = 5\%$. Sehingga hal ini dapat diartikan secara parsial variabel pengeluaran pemerintah (X_2) berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah (Y) Provinsi Aceh periode tahun 1990-2022.

Sedangkan pada variabel Jumlah penduduk (X_3) diperoleh t_{hitung} (2,510) dan t_{tabel} (2,035). Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan signifikansi sebesar 0,039 atau signifikansi jumlah penduduk (X_3) berada di bawah $\alpha = 5\%$. Sehingga hal ini dapat diartikan secara parsial jumlah penduduk (X_3) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan asli daerah (Y) Provinsi Aceh periode tahun 1990-2022.

4.2. Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Regional Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Tabel 4.1 nilai koefisien regresi pengaruh pertumbuhan ekonomi regional (X_1), terhadap pendapatan asli daerah (Y) 0,467. Nilai koefisien regresi sebesar 0,467 menunjukkan bahwa koefisien pertumbuhan

ekonomi regional (X_1), tidak sama dengan nol ($\beta_i \neq 0$). Berdasarkan rancangan pengujian hipotesis, syarat untuk menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi regional (X_1), berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (Y) apabila ($\beta_i \neq 0$). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi regional berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Aceh periode 1990-2022.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PRDB merupakan indikator ekonomi yang pada umumnya digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi (pertumbuhan ekonomi). PRDB menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya, apabila PRDB disuatu daerah mengalami peningkatan artinya pertumbuhan ekonomi daerah tersebut meningkat. Daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi akan banyak diminati oleh investor untuk berinvestasi, hal ini merupakan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya dan sekaligus peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya tersebut.

Dalam hal ini, Halim (2015), berpendapat bahwa Pendapatan Asli Daerah di pengaruhi oleh Produk Domestik Regional Bruto. Hubungan antara PDRB dengan PAD ini cukup erat, dimana keduanya terkait secara fungsional, karena pajak daerah merupakan fungsi dari PDRB, yaitu dengan meningkatnya PDRB akan menambah penerimaan pemerintah dari pajak daerah. Selanjutnya dengan bertambahnya penerimaan pemerintah akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat yang akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kembali. Begitu juga sebaliknya dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita masyarakat, maka akan mendorong kemampuan masyarakat

untuk membayar pajak dan pungutan lainnya. Hal ini secara langsung juga menambah pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Harry (2013), menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Provinsi Maluku. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t-hitung sebesar 9.657 atau lebih besar dibandingkan dengan nilai t-tabel 3,182 ($t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$) dengan tingkat signifikansi 0,000 ($p < 0,005$).

4.2.2 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan asli daerah

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa nilai koefisien regresi yang diperoleh dari pengaruh pengeluaran pemerintah (X_2) terhadap pendapatan asli daerah (Y) adalah sebesar 0,140. Nilai koefisien regresi sebesar 0,140 menunjukkan bahwa koefisien regresi pengeluaran pemerintah (X_2) tidak sama dengan nol ($\beta_2 \neq 0$). Berdasarkan rancangan pengujian hipotesis, syarat untuk menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah (X_2) berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (Y) apabila ($\beta_2 \neq 0$). Pengaruh tersebut juga bersifat positif dan signifikan (0,000). Mengacu pada syarat tersebut, hasil penelitian ini menolak H_0 (Hipotesis nol) atau menerima H_a (Hipotesis alternatif). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengeluaran pemerintah (X_2) berpengaruh terhadap Pendapatan asli daerah Provinsi Aceh periode 1990-2022.

Hal ini juga sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Peacock dan Wiseman (Dumairy, 2016) bahwa apabila pengeluaran pemerintah daerah meningkat, secara relatif pendapatan perkapita pun akan meningkat. Dalam hal ini pemerintah daerah memiliki peran sebagai katalisator dan fasilitator sehingga membutuhkan anggaran belanja untuk melakukan pembangunan. Pernyataan ini juga dibuktikan dengan data dari realisasi

anggaran pengeluaran dari pemerintah Provinsi Aceh, dimana pertumbuhan ekonomi regional yang setiap tahun meningkat, serta merta dapat meningkatkan pendapatan asli daerah pula.

Hal yang sama juga dikemukakan Mardiasmo (2012), bahwa salah satu solusi peningkatan pendapatan asli daerah yaitu membuat pertumbuhan ekonomi regional dengan alokasi belanja yang tepat. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi regional yang dialokasikan pada belanja daerah, diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pula.

Penelitian serupa juga pernah dilakukan Harry (2013), dimana pada hasil penelitian yang dilakukannya, juga menemukan adanya pengaruh positif dan signifikan dari pertumbuhan ekonomi regional terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai standard beta sebesar 0,532 nilai t hitung = 8,859 lebih besar dibandingkan t-tabel 2,776 ($t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$) dengan tingkat signifi-kansi 0,000 ($p < 0,005$).

4.2.3 Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa nilai koefisien regresi yang diperoleh dari pengaruh jumlah penduduk (X_3), terhadap pendapatan asli daerah (Y) adalah sebesar 0,492. Nilai koefisien regresi sebesar 0,492 menunjukkan bahwa koefisien regresi jumlah penduduk (X_3) tidak sama dengan nol ($\beta_2 \neq 0$). Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel pendapatan asli daerah Provinsi Aceh periode 1990-2022 dengan signifikansi sebesar 0,039 atau lebih kecil dari α 0,05.

Hal ini juga sesuai dengan pendapat Simanjuntak (2019), yang mengatakan bahwa pendapatan asli daerah dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang ditarik juga akan meningkat. Penduduk merupakan sumber daya utama yang berpengaruh besar terhadap pembangunan di suatu wilayah. Jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat ditarik juga meningkat, semakin banyaknya jumlah penduduk maka pendapatan asli daerah akan semakin meningkat dari banyaknya iuran dari penduduk seperti pajak daerah atau retribusi daerah.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Riska (2014) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pertumbuhan ekonomi regional, pengeluaran pemerintah dan jumlah penduduk berpengaruh secara simultan terhadap Pendetapan Asli Daerah di Provinsi Aceh periode 1990-2022. Hal ini ditunjukkan oleh t-hitung lebih besar dari t-tabel.
2. Pertumbuhan ekonomi regional berpengaruh secara parsial terhadap Pendetapan Asli Daerah di Provinsi Aceh 1990-2022.
3. Pengeluaran pemerintah berpengaruh secara parsial terhadap Pendetapan Asli Daerah di Provinsi Aceh 1990-2022.
4. Jumlah penduduk berpengaruh secara parsial terhadap Pendetapan Asli Daerah di Provinsi Aceh 1990-2022.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka saran yang dapat diberikan antara lain:

- 1) Diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk menambah beberapa variabel baru lainnya yang diduga dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah, seperti dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dana bagi hasil dan lain-lain yang dianggap sesuai dalam memengaruhi pendapatan asli daerah.
- 2) Disarankan bahwa pemerintah daerah sebaiknya mencari sumber-sumber pendapatan daerah yang baru atau menggali lebih dalam lagi sumber penerimaan dari PAD dengan melakukan efisiensi dan

efektivitas anggaran berdasarkan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan dengan baik maka bukan tidak mungkin apabila tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat dalam dana transfer pemerintah pusat dapat dikurangi dari waktu ke waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, (2016). *Local Original Revenue (PAD) as A Source of Development Financing*. Makalah disampaikan pada konferensi IRSA (Indonesian Regional Science Association) ke 6 di Yogyakarta.
- Adisasmita, (2014). *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah*, cetakan pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Arsyad. (2019). *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: STIE YKPN
- Bailah. (2019). *Pengelolaan Administrasi Penduduk Desa*. Jakarta: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Baldric. (2017). *Akuntansi Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Boediono. (2009). *Sinopsi Pengantar Ilmu Ekonomi No. 4, Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPF
- BPR RI. (2020). *Katalog BPS Tahun 2019*. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
- Carunia, Mulya. (2017). *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Gani, Imam. (2015). *Aplikasi analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Handoko. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Harry. (2013). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB dan PAD. *Jurnal Economia*, Volume 9, Nomor 1, April 2013
- Hartono, Jogiyanto. (2018). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Edisi Kelima. Yogyakarta: BPF.
- Julian. (2019). *Rumus Praktis Menguasai Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Boo Publisher Cet.Ke-1

- Kurniawan. (2015). Analisis Alokasi Belanja Modal Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Barat Tahun 2010-2014. *Jurnal Komunika Bisnis*. Vol 3 No. 2. Universitas Padjajaran
- Lisa, N. (2020). Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh (Doctoral dissertation, UIN AR-RANIRY).
- Menteri Dalam Negeri (2007). Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 59 Tahun 2007 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Riska. (2014). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Riau. *Jurnal JPMA*. Vol. I No. I. SSN: 2088-0685
- Sabaruddin, Abdul (2016). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Arah Menuju Pemerintahan yang Baik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Saragih, Juli Panglima. (2013). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sucita (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/ Kota Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*. Vol. 3 No. 1 (2014) ISSN: .31052-9934
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarto, H.C. (2015). *Penduduk Indonesia dalam Dinamika Migrasi*. Yogyakarta: Dua Dimensi.
- Todaro. (2017). *Pembangunan Ekonomi Di dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah*.

World Bank of Indonesia, 2003. *Data and Research*.
<https://www.worldbank.org/in/country/indonesia>



Lampiran 3

DATA ASLI VARIABEL

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan Ekonomi Regional (PDRB)	Pengeluaran Pemerintah	Jumlah Penduduk
1990	24.714.323.922	7.237.788.000	294.207.946.783	3.415.837
1991	25.208.610.401	7.968.716.000	297.150.026.251	3.469.770
1992	27.729.471.441	8.595.679.000	300.121.526.513	3.519.522
1993	28.284.060.870	10.883.405.000	303.122.741.778	3.604.758
1994	32.526.670.000	11.245.015.000	306.153.969.196	3.657.078
1995	38.751.425.000	13.091.228.000	327.584.747.040	3.862.800
1996	45.090.085.000	14.636.988.000	360.343.221.744	3.934.000
1997	44.639.012.000	17.056.028.000	378.360.382.831	4.004.600
1998	44.735.873.000	24.956.860.000	454.032.459.397	4.074.900
1999	32.831.973.000	26.991.582.000	460.842.946.288	4.110.100
2000	32.089.319.000	35.883.108.000	470.059.805.214	3.929.234
2001	48.760.692.590	37.654.640.000	474.760.403.266	4.114.000
2002	92.796.189.414	43.705.668.000	1.370.937.958.143	4.166.040
2003	103.532.286.174	48.619.148.000	1.420.277.796.203	4.218.486
2004	198.432.401.754	50.357.260.000	1.963.266.444.837	4.075.599
2005	262.119.988.078	56.951.612.000	2.169.779.959.423	4.031.589
2006	476.909.834.495	69.353.344.000	2.442.721.686.437	4.153.573
2007	587.510.093.459	71.093.360.000	1.966.055.645.173	4.223.833
2008	721.708.102.681	73.530.749.000	5.715.623.665.304	4.293.915
2009	735.205.788.491	70.757.764.000	7.642.847.005.194	4.363.477
2010	355.478.590.000	101.545.236.000	6.029.982.270.000	4.494.410
2011	760.931.665.767	104.874.211.000	7.374.625.389.279	4.597.308
2012	901.720.376.621	108.914.897.000	8.757.319.943.552	4.693.934
2013	1.325.435.091.289	111.755.826.000	11.220.427.555.134	4.811.133
2014	1.731.130.839.637	113.490.359.000	12.045.847.341.693	4.906.835
2015	1.972.049.032.902	112.665.532.000	12.135.635.484.501	5.201.953
2016	2.060.180.945.551	116.374.299.000	17.314.425.808.142	5.296.248
2017	2.276.305.568.814	121.240.978.000	13.832.848.610.133	5.289.466
2018	2.359.385.393.646	126.824.365.000	12.306.306.187.481	5.281.314
2019	2.698.912.471.144	132.069.570.000	15.787.883.385.490	5.371.532
2020	2.570.775.877.183	131.580.967.000	13.242.212.801.895	5.274.871
2021	2.505.887.909.031	135.251.193.000	13.683.582.127.432	5.233.733
2022	1.450.363.540.947	140.947.643.000	14.776.246.916.127	5.807.855

SPSS OUT PUT

Descriptives

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	33	24,714	2,698,912	805,216.15	932,246.942
Pertumbuhan Ekonomi Regional	33	7,238	140,948	68,427.45	46,589.919
Pengeluaran Pemerintah	33	294,208	17,314,426	5,685,624.06	5,881,071.254
Jumlah Penduduk	33	3,416	5,808	4,408.64	645.597
Valid N (listwise)	33				



Regression

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,948 ^a	,899	,888	311,788.705

a. Predictors: (Constant), Jumlah Penduduk, Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi Regional

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	249915458217 20,523	3	833051527390 6,841	85,694	,000 ^b
	Residual	281915370755 5,715	29	97212196812, 266		
	Total	278106995292 76,240	32			

a. Dependent Variable: PAD

b. Predictors: (Constant), Jumlah Penduduk, Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi Regional

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,073	1,758		2,886	,034
	Pertumbuhan Ekonomi Regional	,467	,120	,023	3,892	,011
	Pengeluaran Pemerintah	,140	,031	,885	4,506	,000
	Jumlah Penduduk	,492	,196	,090	2,510	,039

a. Dependent Variable: PAD

Lampiran 5

RIWAYAT HIDUP

Nama : Syahrial Sagir
NIM : 160604023
Tempat/Tgl. Lahir : Samalanga, 30 Maret 1997
Status : Mahasiswa
Alamat : Lamdingin
No. HP : 082249431047
Email : 160604023@student.ar-raniry.ac.id

Riwayat Pendidikan

1. SD : SD Negeri 1 Simpang Mamplam
2. SMP : SMP Negeri 1 Simpang Mamplam
3. SMA : SMA Negeri 1 Kuala
4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah : Abdul Munir
Pekerjaan : Pensiun PNS
Nama Ibu : Nyak Helmiah
Alamat Orang Tua : Samalanga